

**LAPORAN PENELITIAN**

**ELIT AGAMA DAN RESOLUSI KONFLIK**

**(Studi Atas Peran Tokoh Lintas Agama dalam Upaya Bina Damai di Kota  
Mataram)**



**Oleh**

**S U P R A P T O**

**NIP 197207202000031002**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MATARAM**

**2015**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : **Radikalisme Keagamaan & Tindak Terorisme di Pesantren (Studi Atas Respon dan Peran Pondok Pesantren di Lombok)**

Nama Peneliti : Dr. Suprpto, M. Ag

NIP : 197207202000031002

Fakultas/Jurusan : FDK/Pengembangan Masyarakat Islam

Waktu Penelitian : Juni – Oktober 2014

Sumber Dana : DIPA IAIN Mataram 2014

Disahkan Pada tanggal 10 Bulan Oktober 2014

Ketua Lembaga Penelitian  
Pengabdian Pada Masyarakat  
IAIN Mataram

Kepala Pusat Penelitian  
Dan Penerbitan  
IAIN Mataram

Prof. Dr. Hj. Sri Banun Muslim, M. Pd  
NIP. 194607151965102001

Dr. H. Sainun, M. Ag  
NIP. 196412311992031037



## **DAFTAR ISI**

*Cover*

Halaman Pengesahan

Kata Pengantar

### **Bab I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Signifikansi Penelitian .....	3
E. Telaah Pustaka .....	4
F. Kerangka Teoretik .....	6
G. Metode Penelitian .....	11
H. Instrumen Penelitian .....	15
I. Jadwal Penelitian .....	15
J. Daftar Pustaka .....	16

### **BAB II: MATARAM: KOTA MULTIKULTUR**

- A. Sekilas Sejarah Kota
- B. Kondisi Sosial Budaya
- C. Peta dan Potensi Konflik

### **BAB III: PEMIMPIN MASYARAKAT & AGAMA**

- A. Peran Elit di Mataram
- B. Pandangan Elit terhadap konflik
- C. Pandangan Elit terhadap penanganan konflik.

### **BAB IV MENGEMBANGKAN UPAYA BINA DAMAI**

- A. Peran Tokoh dalam Resolusi Konflik
- B. Inisiatif perdamaian
- C. Kendala yang dihadapi

### **BAB V. PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

### **Lampiran-lampiran:**

*Instrumen Penelitian*

*Biodata Peneliti*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **K. Latar Belakang**

Lombok, sebuah pulau eksotis yang terletak di Timur Pulau Bali, dikenal dengan sebutan “pulau seribu masjid”. Sebutan ini selain mengindikasikan banyaknya tempat ibadah umat muslim, juga secara sengaja merujuk adanya kenyataan bahwa Islam merupakan agama mayoritas di wilayah ini. Nuansa Islam terlihat sangat kental dalam keseluruhan aspek kehidupan masyarakat Lombok.<sup>1</sup> Banyaknya jumlah lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren, tingginya animo masyarakat untuk pergi haji adalah sebagian indikator konkrit kuatnya Islam dalam struktur budaya masyarakat Sasak-Lombok.

Kultur Islam yang kuat ditambah keindahan alam pantai dan pegunungan yang sangat menawan menjadikan pulau ini sebagai salah satu destinasi wisata yang sangat diperhitungkan di Indonesia. Hanya saja, keindahan, ketenangan dan harmoni di Lombok kerap terusik oleh serangkaian konflik berbau kekerasan (*violence conflict*). Ragam dan jenis konflik bermacam-macam. Mulai konflik antar kampung, konflik antar dan intra agama hingga konflik akibat persoalan ekonomi dan politik.

---

<sup>1</sup> Dalam praktiknya, meskipun ada varian lain di Lombok seperti Islam *wetu telu*, tetapi secara keseluruhan Islam telah lama dianut masyarakat Lombok. “Menjadi Sasak berarti menjadi muslim”, demikian pernyataan John Ryan Bartholomew yang mengutip peneliti sebelumnya seperti Ecklund 1981; 4 dan Judd 1980; 89 . Lihat John Ryan Bartholomew, *Alif Lam Mim Kearifan Masyarakat Sasak* ter. Imron Rasyidi (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 86. Tentang konflik antara Islam *Wetu Telu* dan *Waktu Lima* selengkapnya lihat Erni Budiwanti, *Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima* (Yogyakarta: LkiS, 2000); Sven Cederroth, *The Spell of The Ancestors and The Power of Mekkah, A Sasak Community on Lombok*, (Goteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 1981).

Upaya penanganan konflik yang selama ini dilakukan oleh pemerintah terkesan hanya menyelesaikan atau mengakhiri konflik, belum mengarah pada upaya transformasi konflik secara berkelanjutan. Akibatnya, meskipun konflik terlihat berhenti, tetapi potensi konflik yang sama bisa saja muncul di lain waktu. Oleh karenanya yang diperlukan bukanlah penghentian konflik –apalagi jika dilakukan secara represif- tetapi manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan upaya konstruktif yang direncanakan, diorganisasikan, digerakan dan dievaluasi secara teratur sehingga konflik tidak mengarah pada hal-hal yang destruktif.<sup>2</sup> Di sinilah diperlukan kehadiran dan prakarsa pemimpin baik pemimpin formal maupun informal untuk mengembangkan pola-pola resolusi konflik dan bina damai.

Kehadiran pemimpin terutama pemimpin informal seperti pemimpin agama-agama menjadi penting untuk mengajak umat masing-masing menciptakan harmoni sosial dan mengembangkan bina damai. Keberadaan pemimpin agama semakin penting terutama ketika pemimpin formal kekurangan legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat. Peran pemimpin agama dalam mengembangkan upaya bina damai (*peace building*) sangat potensial, mengingat mereka merupakan tokoh-tokoh kharismatik yang sangat disegani di Lombok.

Berangkat dari kenyataan di atas, maka penting untuk dilakukan penelitian secara mendalam mengenai peran pemimpin lintas agama dalam menangani dan mengelola konflik. Mengingat wilayah Lombok sangat luas,

---

<sup>2</sup> Ini merupakan pendapat Robinson dan Clifford yang dikutip oleh Alo Liliweri. Lihat Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur* (Yogyakarta, LkiS, 2005), 288.

penelitian ini hanya difokuskan di wilayah Kota Mataram. Salah satu kota terpenting di pulau Lombok.

## **L. Rumusan Masalah**

Berangkat dari pemikiran di atas, ada sejumlah persoalan penting yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran pemimpin agama dalam resolusi konflik?
2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemimpin agama dalam mengembangkan program bina damai?
3. Apa kendala yang dihadapi pemimpin agama dalam mengembangkan program bina damai?

## **M. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk;

1. Mengetahui peran pemimpin agama dalam mengembangkan program resolusi konflik.
2. Mengelaborasi upaya-upaya yang dilakukan pemimpin agama dalam mengembangkan program bina damai (*peace building*).
3. Mengungkap kendala yang dihadapi pemimpin agama dalam mengembangkan program bina damai

## **N. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini memiliki urgensi dan signifikansi tinggi baik dari sisi akademis maupun praktis. Dari sisi **akademis**, kajian yang mendalam mengenai perang pemimpin agama dalam resolusi konflik akan menambah

khazanah baru pengetahuan di bidang manajemen konflik, terutama pola penanganan konflik yang mengusung nilai inklusif dan harmoni agama-agama.

Adapun manfaat **praktis** yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah tersedianya data yang memadai mengenai usaha-usaha pemimpin agama dalam menghadapi dan mengelola konflik. Data-data baru ini penting bagi pemerintah dan perguruan tinggi untuk mengembangkan serangkaian program manajemen konflik seklaligus sebagai upaya mengembangkan program bina damai (*peace building*) di masa depan.

## **O. Telaah Pustaka**

Sebagai fenomena sosial keagamaan, kajian mengenai konflik dan pola-pola penanganannya merupakan kajian yang menarik minat peneliti. Sejumlah penelitian yang berkaitan dengan konflik dan penanganannya antara lain sebagai berikut:

Saipul Hamdi (2014) meneliti konflik-konflik yang melibatkan organisasi keagamaan terbesar di Nusa Tenggara Barat yakni Nahdlatul Wathan (NW). Melalui penelitian mendalam yang kemudian diterbitkan dalam sebuah buku berjudul “Nahdlatul Wathan: Agama Konflik Komunal dan Peta Rekonsiliasi” ini, Hamdi dengan ekstensif menguraikan faktor-faktor penyebab konflik di tubuh NW. Faktor penyebab terjadi konflik di NW sangat banyak yang mencakup faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain poligami, kekuasaan, kepentingan ekonomi dan perebutan legitimasi. Sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi politik



lokal dan nasional.<sup>3</sup> Selain itu, Hamdi juga menyebutkan sejumlah upaya yang telah dilakukan untuk menyelamatkan NW. Temuan Hamdi menyebutkan bahwa konflik NW merupakan salah satu konflik lokal produk reformasi 1998 yang mengalami kegagalan dalam rekonsiliasi.<sup>4</sup>

Masih terkait dengan konflik tubuh NW, sebelumnya Fathurrahman Mukhtar (2010) meneliti tentang konflik pengelolaan lembaga pendidikan yang ada di NW. Penelitian untuk kepentingan disertasi ini berjudul “Konflik dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam di Pesantren Organisasi Nahdlatul Wathan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat”. Dalam penelitian ini terungkap bahwa konflik kepengurusan di tubuh NW, berakibat pada lembaga-lembaga pendidikan yang selama ini dikembangkan oleh NW. Perpecahan pada organisasi terbesar di Nusa Tenggara Barat ini<sup>5</sup> berimplikasi pada adanya perpecahan lembaga-lembaga pendidikan yang dinaunginya.<sup>6</sup>

Konflik yang terjadi di tingkat elit keagamaan memang potensial merambat kepada dunia pendidikan dan gesekan di akar rumput. Hal ini

---

<sup>3</sup> Selengkapnya silahkan lihat Saipul Hamdi, *Nahdlatul Wathan: Agama Konflik Komunal dan Peta Rekonsiliasi* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2014), 199.

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Konflik terjadi karena adanya perpecahan di tubuh NW yang kemudian menghasilkan dua kepengurusan di tubuh NW, yakni NW Anjani (para pengurus berpusat di desa Anjani) yang dipimpin oleh Hj. Rachanun dan NW Pancor (berpusat di Pancor) yang dipimpin oleh Rauhun. Kedua tokoh ini adalah putri TGKH Muhammad Zaenuddin Abdul Majid yang merupakan pendiri Nahdlatul Wathan. Konflik kedua kubu ini berlangsung cukup lama dan di tingkat *grass root* konflik ini sampai memakan korban jiwa. Bederapa pihak terus mengupayakan *islah* (perdamaian). Selengkapnya baca Selengkapnya silahkan lihat Saipul Hamdi, *Nahdlatul Wathan: Agama Konflik Komunal dan Peta Rekonsiliasi* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2014), 199; Suprpto, *Semerbak Dupa di Pulau Scribu Masjid* (Jakarta: Prenada Kencana, 2013), 149.

<sup>6</sup> Fathurrahman Mukhtar, *Konflik dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam di Pesantren Organisasi Nahdlatul Wathan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat*, Disertasi pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

juga terungkap melalui penelitian Mayadi (2014) mengenai peran Tuan Guru Munajib dalam Manajemen Konflik. Melalui penelitian yang dilakukan untuk kepentingan Tesis ini, Mayadi mengelaborasi sumber-sumber konflik di pondok pesantren al-Halimi Sesela. Selain menyelidiki sumber dan penyebab konflik, Mayadi juga menemukan bahwa musyawarah merupakan pola umum yang digunakan Tuan Guru Munajib dalam menghadapi dan mengelola konflik.

Jeremy Kingsley (2010) melalui penelitian yang berjudul *Tuan Guru, Community and Conflict in Lombok, Indonesia*, mengkaji peran pemimpin informal, Tuan Guru, dalam menghadapi konflik di masyarakat dan upaya-upaya kreatif yang dilakukannya untuk menenangkan massa. Melalui studi *ethnography*, Jeremy menemukan fakta bahwa peran Tuan Guru di Lombok sangat penting dalam menyelesaikan konflik terutama di saat pemimpin formal kurang mendapat kepercayaan (*trust*) dari masyarakat.<sup>7</sup>

Konflik di tingkat internal umat beragama juga tak luput dari kajian peneliti. Lalu Zaenuri (2009) melakukan penelitian berjudul “Konflik Jemaat Ahmadiyah dengan Masyarakat Non Ahmadiyah (Studi Kasus di Lombok Nusa Tenggara Barat)”. Dalam penelitian untuk kepentingan disertasi ini, Lalu Zaenuri melihat bahwa kegagalan komunikasi yang dibangun oleh para elit agama menyebabkan terjadinya ketegangan dan konflik kekerasan antara kelompok Islam *mainstream* dengan kelompok

---

<sup>7</sup> Jeremy Kingsley, *Tuan Guru, Community and Conflict in Lombok, Indonesia*, Ph.D thesis, (Melbourn: The University of Melbourn, 2010).

yang dianggap “sempalan”, Ahmadiyah.<sup>8</sup> Penanganan dan penyelesaian secara tuntas mengenai konflik yang melibatkan pengikut Mirza Ghulam Ahmad ini hingga kini belum tuntas. Sejumlah warga Ahmadiyah masih berada di pengungsian pascaperusakan rumah tinggal mereka. Sebagian besar umat Islam belum bisa menerima kehadiran kelompok yang dianggap melakukan banyak penyimpangan agama.

Kekerasan tidak hanya menimpa mereka yang dianggap menyimpang atau *bid'ah* (*heterodoks*), seperti Ahmadiyah, sebagian anggota masyarakat juga menyerang anggota kelompok Salafi. Sebagaimana terungkap dalam penelitian Faizah (2010), bahwa kelompok Salafi, kelompok keagamaan yang menekankan pada kegiatan purifikasi agama ini, telah beberapa kali mendapatkan resistensi dari masyarakat. Tercatat kekerasan terjadi beberapa kali di sejumlah tempat, seperti di Gelogor kecamatan Sekotong Tengah, di dusun Beroro desa Jembatan Kembar kecamatan Lembar, desa Sesela kecamatan Gunung Sari dan di dusun Mesanggok desa Gapuk kecamatan Gerung, semuanya di wilayah Kabupaten Lombok Barat.<sup>9</sup> Selain itu, sebelumnya, kekerasan juga terjadi terhadap pengikut aliran Wahabi di kecamatan Masbagik Lombok Timur.

Dari tilikan atas sejumlah penelitian mengenai konflik di Lombok, sebagian besar penelitian memfokuskan kajiannya pada ketegangan dan konflik yang terjadi di tingkat internal agama yakni agama Islam. Penelitian

---

<sup>8</sup> Lihat L. Ahmad Zaenuri, “Konflik Jemaat Ahmadiyah dengan Masyarakat Non Ahmadiyah (Studi Kasus di Lombok Nusa Tenggara Barat)” Disertasi SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

<sup>9</sup> Faizah, *Dakwah Salafiyah di Lombok (Suatu Kajian Komunikasi antar Budaya)*, Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010; 185.

yang secara khusus memfokuskan kajian pada pemikiran, pandangan dan tindakan yang dilakukan oleh pemimpin lintas agama, belum banyak dilakukan. Pada posisi inilah, terdapat perbedaan penelitian yang akan dilakukan ini dengan riset-riset sebelumnya. Penelitian ini akan melihat peran yang dilakukan oleh para pemimpin lintas agama dalam mengembangkan resolusi konflik. Sejumlah upaya berikut kendala yang dihadapi pemimpin lintas agama dalam menangani konflik akan menjadi temuan menarik sekaligus menjadi bahan terpenting bagi upaya mengembangkan program binai damai (*peace Building*).

## **P. Kerangka Teoretik**

Dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial, manusia jelas pernah terlibat dalam konflik. Konflik merupakan kenyataan hidup yang tidak terhindarkan dan kadang bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan tidak sejalan atau karena kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya serta sudut pandang terhadap suatu permasalahan. Ralf Dahrendorf menyatakan bahwa konflik merupakan fenomena yang selalu hadir (*inherent omnipresence*) dalam suatu komunitas<sup>10</sup>. Pada tingkatan ini, konflik sebetulnya merupakan fenomena alamiah yang menyertai pola interaksi manusia sepanjang masa.<sup>11</sup> Persoalannya adalah ketika konflik berubah menjadi

---

<sup>10</sup> Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society* (Stanford: Stanford University Press, 1959), 241 – 248.

<sup>11</sup> Lewis Coser melihat bahwa konflik merupakan bagian dari dinamika masyarakat karenanya memberi efek positif bagi soliditas grup. Terdapat tiga argumentasi yang mendasari pendapatnya. *Pertama*, situasi konflik akan meningkatkan kohesi internal dari kelompok-

kekerasan atau anarki apalagi dengan melibatkan massa dalam jumlah yang sangat banyak. Harmoni sosial yang telah terbangun biasanya akan berubah menjadi *chaos*.

Ada banyak teori yang menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya konflik. Salah satu di antaranya adalah yang dikemukakan oleh Simon Fisher dkk yang menyebutkan beberapa teori tentang terjadinya konflik: *Pertama*, Teori hubungan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa konflik terjadi disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidak-percayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat. *Kedua*, teori negosiasi konflik. Menganggap bahwa konflik terjadi oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. *Ketiga*, teori keutuhan manusia. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia-fisik, mental dan sosial-yang tidak terpenuhi atau terhalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan. *Keempat*, teori identitas. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. *Kelima*, teori kesalahpahaman antarbudaya. Teori berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Dan *keenam*, teori transformasi konflik. Bahwa konflik

---

kelompok terkait; *kedua*, mampu menciptakan assosiasi-assosiasi dan koalisi-koalisi baru dan *ketiga*, dengan konflik akan terbangun keseimbangan kekuatan antar kelompok terlibat Lihat, Lewis Coser, *The Function of Social Conflict*, (New York: Free Press, 1965).

disebabkan oleh ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi.<sup>12</sup>

Konflik kekerasan juga bisa dilihat dari perspektif konflik elit. Seperti diketahui pasca reformasi, selain beberapa kerusuhan, kondisi sosial politik di Indonesia ditandai dua gejala yang mencolok yakni konflik politik (*political conflict*) dan kekerasan politik (*political violence*). Tarik menarik kepentingan politik elit di satu sisi dapat menyumbang proses demokratisasi, tetapi dampak buruknya dapat memunculkan pengkotak-kotakan masyarakat yang akibatnya cenderung menimbulkan kekerasan kolektif.<sup>13</sup>

Johan Galtung melihat konflik selalu melibatkan tiga hal yakni adanya *contradiction* (C) antara *attitude* (A) dan *behaviour* (B). Ia juga melihat bahwa konflik terdiri dari *Structural violence*, *cultural violence* dan *direct violence*. Untuk itu Galtung menawarkan tiga model yang saling terkait, yaitu; *peace keeping*, *peace building*, *peace making*. ***Peace keeping*** dilakukan ketika konflik benar-benar tak bisa dihentikan secara halus. Pelibatan aparat keamanan atau militer terpaksa ditempuh guna menghentikan konflik. ***Peace building*** merupakan strategi yang mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat konflik dengan jalan membangun jembatan komunikasi antara pihak yang terlibat. Sedangkan ***peace making***,

---

<sup>12</sup> Simon Fisher, at all, *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, ter. S.N. Karikasari dkk. (Jakarta: The British Council Responding to Conflict, tth), 4.

<sup>13</sup> Lihat Muhsin Jamil, (ed). *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik* (Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007)

adalah upaya negosiasi antara kelompok yang memiliki perbedaan pandangan dan kepentingan.<sup>14</sup>

Untuk menangani konflik diperlukan upaya yang salah satunya dinamakan resolusi konflik. Resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai sebuah proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik melalui beberapa tahap sesuai status konflik.<sup>15</sup> Ada empat tahapan dalam resolusi konflik yaitu: (1). Tahap de-eskalasi konflik yang menekankan pada proses penghentian kekerasan. Militer atau aparat keamanan biasanya akan melakukan pekerjaan ini. (2) Tahap negosiasi, langkah penyelesaian yang lebih berorientasi politik dengan melibatkan kelompok-kelompok yang bertikai. (3) Tahap *problem solving approach* yang lebih bernuansa sosial. (4) Tahap *peace building*, yakni tahap yang bersifat kultural dan struktural. Memerlukan waktu yang panjang dan konsistensi untuk mewujudkan perdamaian yang permanen. Rothman menjabarkan ada empat komponen utama pada tahap *problem solving approach*<sup>16</sup>. *Pertama*, masing-masing pihak mengakui legitimasi pihak lain untuk melakukan inisiatif komunikasi tingkat awal. *Kedua*, masing-masing pihak memberi informasi yang benar

---

<sup>14</sup> Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse and Hugh Mial, *Contemporary Conflict Resolution. The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts* (Cambridge: Polity Press, 2006), 10.

<sup>15</sup> Syafuan Rozi dkk., *Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 21 – 22. Dengan pengertian yang agak berbeda Morton mendefinisikan resolusi konflik sebagai sekumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat konflik, penyebab, dan alternatif strategi penyelesaian. Lihat Morton Deutsch, *The Resolution of Conflict* (New Haven: Yale University Press, 1973), 420.

<sup>16</sup> J. Rothman, *From Confrontation to Cooperation: Resolving Ethnic and Regional Conflict* (Newbury Park, CA: Sage, 1992), 30

tentang konflik yang sedang terjadi meliputi penyebab, trauma yang timbul, hambatan struktural yang mungkin dihadapi dalam resolusi konflik. *Ketiga*, kedua belah mulai mencari alternatif solusi setidaknya *signal-signal* menuju perdamaian. *Keempat*, *problem solving workshop* yakni kesediaan pihak-pihak untuk menyediakan suasana kondusif bagi resolusi konflik.

Dari semua versi yang ada, satu hal yang sangat diharapkan dalam menangani konflik adalah kesediaan pihak-pihak yang memiliki otoritas agar bertindak secara obyektif dan netral. Prinsip ini perlu diambil agar pihak-pihak yang terlibat tidak ada yang merasa dirugikan dan merasa *legowo* (*satisfaction*). Selain langkah-langkah yang bersifat kuratif, tentu saja perlu dilakukan tindakan-tindakan yang bersifat preventif agar potensi konflik kekerasan dapat diantisipasi. Langkah yang disebut kedua ini lebih penting ketimbang langkah pertama. Pemerintah dan masyarakat mestinya mengembangkan pencegahan dari pada menunggu konflik muncul ke permukaan. Upaya-upaya pencegahan merupakan bagian dari upaya bina damai secara berkelanjutan.

Terkait dengan konflik yang kerap terjadi, elit agama memiliki peran penting terutama pada konflik bernuansa agama. Otoritas keilmuan keagamaan yang tidak dimiliki oleh elit pemerintah menjadikan elit agama sebagai “penyelesai akhir” dari sebuah konflik yang terjadi. Di sinilah persoalan kadangkala menjadi *complicated*. Penanganan konflik yang melibatkan unsur agama biasanya relatif lebih susah dan berlarut-larut. Apalagi jika para pemimpin agama kurang bertindak netral. *Alih-alih*



melakukan mediasi antara dua belah pihak yang bersengketa sehingga elit agama benar-benar menjadi *solution of the problem*, kehadirannya tak jarang memperkeruh suasana atau menjadi *part of the problem*.

Para pemimpin agama, dengan demikian bisa memainkan peran ganda: *menjadi pendamai atau malah menjadi penyulut konflik*. Dengan meminjam bahasa Kingsley, elit agama dapat bertindak sebagai *peace-maker* sekaligus juga bisa berperan sebagai *peace-breaker*.<sup>17</sup> Dalam kasus Ahmadiyah, seperti dicatat oleh Erni Budiwanti, sejumlah tuan guru mengizinkan dan bahkan memperbolehkan cara kekerasan dalam “menyadarkan” warga Ahmadiyah.<sup>18</sup> Karena kelompok yang disebut terakhir dianggap telah menodai agama Islam. Kasus lain yang memperlihatkan peran pemimpin agama sebagai *peace breaker* dapat ditinjau pada kasus-kasus konflik antara pamswakarsa dengan masyarakat atau antar kelompok pamswakarsa.<sup>19</sup>

Erni Budiwanti dalam kajiannya mengenai peran tuan guru di Lombok, menemukan fakta bahwa dalam konflik Ahmadiyah, sebagian tuan guru malah menjadi perusak perdamaian (*peace-breaker*).<sup>20</sup>

Pernyataan terakhir memang bernada skeptis. Mana mungkin seorang pemimpin agama yang semestinya membawa pesan perdamaian tetapi justru menjadi “provokator”? Dari berbagai konflik yang acap muncul

---

<sup>17</sup> Jeremy J Kingsley, “Peacemakers or Peace-Breakers? Provincial Elections and Religious Leadership in Lombok, Indonesia”, *Indonesia* 93 (Apr 2012): 53-82.

<sup>18</sup> Erni Budiwanti, “Pluralism Collapses: A Study of The Jamaah Ahmadiyah Indonesia and its Persecution,” ARI Working Paper No. 117, National University of Singapore, May 2009.

<sup>19</sup> Selengkapnya lihat Kingsley, “Peacemakers or Peace-Breakers?”, 53-82.

<sup>20</sup> Erni Budiwanti, “Pluralism Collapses...”

di berbagai daerah, eskalasi konflik bisa bertambah manakala ada *support* - paling tidak pembiaran - dari sebagian elit yang karena kesalahan memahami persoalan membiarkan umat melakukan kekerasan. Dari latar perkembangan konflik, terutama konflik bernuansa agama, setidaknya ada tiga faktor yang melingkupi, yaitu; *setting history*, *setting cultural* dan *political conditioning*.<sup>21</sup> Melalui *setting history*, kita dapat memahami bahwa sejarah agama umumnya merupakan kronologi iman di tengah konflik sistematis antara mereka yang percaya *the true believer* dan *the unbeliever* secara hitam putih. Di sini pilihannya jelas, menyebarkan firman Tuhan atau berjuang hingga mati menjadi “syahid”.

Melalui *setting cultural* pola keberagamaan masyarakat dapat dilihat sebagai sebuah proses menyuburkan kultur paternalistik. Anggapan bahwa perilaku keagamaan yang diperankan para elit lebih tinggi daripada ketaatan orang awam, seringkali menggiring seseorang untuk mengikuti apa saja kata elit agama. Sikap paternalistik ini konon memiliki akar historis yang kuat. Para raja *tempoe doeloe* sering tampil menjadi penentu sikap keberagamaan rakyatnya.

Sementara melalui *political conditioning*, agama rawan dimanipulasi untuk kepentingan politik (*political interest*). Demi mencapai keinginan politik kekuasaan, seseorang atau sekelompok orang tanpa disadari kerap membawa-bawa agama untuk membenarkan tindakan yang menguntungkan kelompoknya.

---

<sup>21</sup> Nur Achmad (Ed), *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keragaman* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), 100-101.

Posisi elit baik pemerintah maupun elit agama dengan demikian memegang posisi kunci dalam menciptakan rasa damai di masyarakat. Pada masyarakat dengan kultur paternalistik yang masih tinggi keberadaan elit kerap menjadi contoh bagi masyarakat pada level di bawahnya. Perilaku, sikap dan pemikiran para elit yang inklusif akan sangat membantu terciptanya keharmonisan masyarakat. Sebaliknya jika para elit menampilkan diri sebagai sosok yang eksklusif, maka masyarakat juga cenderung tertutup.

## **Q. Metode Penelitian**

**Jenis dan Pendekatan Penelitian.** Penelitian tentang peran elit atau pemimpin lintas agama dalam mengembangkan resolusi konflik ini menggunakan kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif.<sup>22</sup> Kedua jenis pendekatan ini secara sengaja akan dipilih untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang keberadaan pesantren. Beberapa data yang tidak dapat digali melalui teknik kuantitatif akan dilakukan melalui penelusuran kualitatif. Sehingga tidak hanya tabel persentase yang akan diperoleh tetapi juga deskripsi mendalam atau lazim dikenal sebagai *thick description*.

**Setting dan Subyek penelitian.** Penelitian ini mengambil *setting* atau lokus penelitian di Kota Mataram. Adapun subyek penting yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini meliputi pemimpin agama-agama di Mataram, seperti Tuan Guru dan Kyai (Islam), Pedanda (Hindu), Romo

---

<sup>22</sup> Lihat selengkapnya R. Murray Thomas, *Blending Qualitatif and Quantitatif Research Methods in Theses and Dissertation* (California: Corwin Press, Inc A Sage Publications Company, 2003). Juga Julia Brannen, ed. *Mixing Methods: Qualitative and Quantitative Research*, (Vermont: Asghate Publishing Company, 1992).

(Protestan dan Katolik), Bisku (Budha). Subyek penelitian difokuskan pada pemimpin informal dari berbagai agama yang ada di kota Mataram. Termasuk dalam kategori pemimpin lintas agama ini adalah para tokoh yang menjadi pengurus inti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Mataram.

**Teknik Pengumpulan Data.** Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1. Penyebaran Angket.** Untuk data dari representasi umat beragama akan dilakukan penyebaran angket (*quisioner*). Hal-hal penting yang akan digali melalui Dalam angket ini *quisioner* ini berkaitan dengan pandangan dan testimoni umat berkaitan dengan langkah-langkah yang ditempuh para pemimpin agama mereka dalam menyelesaikan sekaligus mengelola konflik.
- 2. Observasi Partisipan.** Teknik pengamatan ini menurut Denzin adalah strategi lapangan yang secara simultan memadukan analisis dokumen, wawancara dengan informan, partisipasi dan observasi langsung serta introspeksi. Melalui tehnik ini, peneliti secara emik (ikut terlibat bersama informan) mengamati, mengikuti, beberapa aktivitas penting yang dilakukan para pemimpin agama dalam menyelesaikan dan memenej konflik. Teknik ini sengaja dipilih untuk melengkapi informasi yang belum dapat terungkap melalui teknik penggalian data yang pertama, yakni penyebaran angket.

3. **Wawancara Mendalam (*In-depth interview*)**. Banyak hal yang dapat diperoleh dari informan lewat cara ini (wawancara mendalam)<sup>23</sup>. Teknik wawancara tak terstruktur merupakan tehnik wawancara yang dipilih dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan wawancara tak terstruktur menurut Dedy Mulyana<sup>24</sup> relevan dengan penelitian ini karena memungkinkan pihak yang diwawancarai untuk mendefinisikan diri dan lingkungannya atau untuk menggunakan istilah-istilahnya sendiri berdasarkan kultur dan tradisi yang mereka anut. Sebagian besar wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan *tape recorder* atas seizin informan. Cara ini diperlukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam mengutip setiap pernyataan yang disampaikan informan. Wawancara akan dilakukan terhadap Tuan Guru, Pedanda, Romo dan Biksu di Kota Mataram.
4. **Studi Dokumentasi**. Menurut Schazman dan Strauss sebagaimana dikutip Mulyana,<sup>25</sup> dokumen merupakan bahan yang penting dalam penelitian kualitatif. Dokumen dalam konteks penelitian ini diperlukan terutama untuk memperkaya landasan-landasan teoritis yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Oleh karena itu, lewat studi dokumentasi, peneliti mengumpulkan buku, jurnal, surat kabar terutama koran lokal seperti Lombok Post dan NTB Post atau sumber-

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 145-6 dan 231-2

<sup>24</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 183.

<sup>25</sup> Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi; Suatu Pengantar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 195.

sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan keberadaan dan perkembangan kasus penanganan konflik di Mataram. Laporan dan data yang ada di Kantor Kementerian Agama baik Propinsi maupun Kota Mataram dan data tentang konflik di Mapolresta Mataram merupakan sumber primer yang juga akan ditelaah.

**Teknik Analisis Data.** Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengikuti tiga tahap analisis data yaitu; reduksi data, penyajian (*display*) data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Ketiga prosedur dan teknik analisis data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1). **Reduksi data.** Data atau informasi yang ada dikelompokkan sesuai dengan topik permasalahan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, dilakukan pengelompokan data menjadi dua kategori data, yaitu; *pertama*, berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan pemimpin agama dalam menangani konflik. *kedua*, berkaitan dengan pandangan dan testimoni umat berkaitan dengan langkah-langkah yang ditempuh para pemimpin agama mereka dalam menyelesaikan sekaligus mengelola konflik.
- (2). **Penyajian (*display*) data.** Setelah data direduksi, tersusun secara sistematis dan dikelompokkan sesuai dengan jenis dan polanya, selanjutnya disusun dalam bentuk bagan-bagan atau narasi-narasi sehingga membentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan permasalahan penelitian.

**(3). Pengambilan kesimpulan dan verifikasi.** Setelah melewati tahap pertama dan kedua, selanjutnya langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah mengambil kesimpulan. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data. Setelah mendapatkan kesimpulan langkah selanjutnya adalah verifikasi. Verifikasi dilakukan dengan cara mencari data baru yang lebih mendalam untuk mendukung kesimpulan yang sudah didapatkannya. Tahap ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan interpretasi dari hasil wawancara dengan sejumlah informan yang dapat mengaburkan makna persoalan sebenarnya dari fokus penelitian ini.<sup>26</sup>

**Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.** Untuk menguji keabsahan data penelitian, peneliti melakukan lima langkah<sup>27</sup> yaitu:

**(1). Memperpanjang waktu penelitian.** Penelitian ini direncanakan berlangsung enam bulan. Apabila dalam waktu tersebut masih ada data dan hal lainnya yang kurang, maka penelitian ini akan diperpanjang hingga data yang dibutuhkan terpenuhi. Moleong menyebut perpanjangan waktu penelitian dibutuhkan untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dengan resiko kekeliruan yang minimal.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Penjelasan secara lebih rinci atas metode ini silahkan baca Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 172 -182.

<sup>27</sup> Menurut Moleong ada lima langkah yang dapat digunakan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 327 - 330.

<sup>28</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 328.

Penting dicatat, waktu yang digunakan untuk perpanjangan penelitian ini akan diupayakan sesuai dengan agenda Lemlit IAIN Mataram.

- (2). **Ketekunan pengamatan**, yaitu menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Ketekunan pengamatan ini dilakukan untuk memahami dan mendapatkan data secara mendalam.
- (3). **Triangulasi**. Proses triangulasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan. Di samping itu, peneliti juga akan melakukan pengamatan atas perilaku komunikasi informan pada momen yang berbeda. Cara seperti ini merupakan teknik triangulasi dengan memanfaatkan penggunaan sumber.
- (4). **Member check**. Teknik ini peneliti lakukan dengan cara mengkonfirmasi kembali hasil penelitian (seperti tipologi, model, kesimpulan, dan lain sebagainya) kepada informan. Hal ini akan dilakukan untuk menghindari kesalahan penafsiran atau kesalahan mengutip pernyataan informan.
- (5). **Pemeriksaan sejawat melalui diskusi**. Teknik ini peneliti akan dilakukan dengan cara mengekpos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat, seperti teman-teman dosen. Dari diskusi inilah peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap data yang kurang cocok atau kurang serasi dengan



fokus penelitian. Termasuk dalam jenis ini adalah kegiatan diskusi berkala antara tim peneliti dengan dosen-dosen di IAIN Mataram mengenai temuan penelitian ini.

## **R. Sistematika Laporan**

Untuk memudahkan pembacaan, laporan penelitian di susun dalam empat bab, yaitu;

Bab pertama berupa pendahuluan. Pada bab ini dipaparkan sejumlah hal penting seperti dasar pemikiran urgensi dilakukannya penelitian ini. Selanjutnya dipaparkan fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik , metode penelitian.

Menyusul bab pendahuluan, berikutnya dipaparkan bab II. Pada bab ini dijelaskan secara singkat mengenai kondisi kota Mataram. Penjelasan mengenai kota Mataram ini penting untuk menghantarkan pembaca mengenal secara lebih dekat kota Mataram sebagai kota multikultur. Hal-hal menarik yang ditampilkan pada bab ini antara lain sejarah kota Mataram, kondisi keagamaan, dan kondisi sosial budaya. Termasuk dalam bagian ini adalah adanya dinamika relasi antarwarga multikultur. Dalam relasi tersebut berlangsung tidak hanya interaksi sosial secara damai yang mengarah pada integrasi sosial, tetapi juga relasi yang bernuansa ketegangan dan konflik. Bab ini juga menarik untuk dibaca terkait potensi-potensi konflik yang bernuansa kekerasan.

Bab berikutnya adalah bab ketiga. Pada bab ini, pembaca disuguhkan keberadaan pemimpin masyarakat & agama. Keberadaan pemimpin informal di Kota Mataram ini menarik untuk dikaji terutama ketika pemimpin formal kurang memperoleh legitimasi dan kepercayaan (trust and social legitimation) dari masyarakat. Sehingga pada bagian ini dipaparkan peran elit di Mataram. Tentu saja sebelum bahasan tentang hal ini, pembaca dapat menelaah definisi elit, kategori, peran sosial, politik, budaya yang mereka mainkan. Termasuk dalam bab ini pembaca dapat mengkaji pandangan para elit terhadap konflik sekaligus pandangan mereka mengenai konsepsi damai.

Bab keempat secara lebih khusus akan melihat peran tokoh masyarakat baik tokoh agama maupun tokoh budaya dalam resolusi konflik. Selain itu, sejumlah inisiatif perdamaian yang telah, sedang dan akan mereka lakukan merupakan catatan penting yang ditampilkan dalam bab keempat ini. Bab ini diakhiri dengan paparan mengenai beberapa kendala yang dihadapi oleh para tokoh.

Bab terakhir adalah penutup. Di bagian akhir laporan penelitian ini ditampilkan beberapa kesimpulan penting yang merupakan penegasan atas jawaban fokus penelitian. Di samping itu, pada bagian akhir, ditampilkan pula beberapa rekomendasi penting terkait pengembangan upaya bina damai.

## **BAB II**

### **MENGENAL MATARAM:**

### **KOTA MULTIETNIS DAN MULTIKULTUR**

Sebagai ibukota provinsi, Kota Mataram merupakan kota termaju dan modern di wilayah NTB. Dalam beberapa tahun terakhir kemajuan kota ini terbilang sangat cepat dibanding kota-kota lain di wilayah NTB. Di sana-sini banyak bermunculan pembangunan pusat-pusat perbelanjaan seperti rumah toko (ruko), *mini market* hingga super mall.

Keberadaan kota Mataram sebagai kota paling maju dibanding dengan kota lain di provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan hal yang wajar. Mengingat kota ini memiliki sejarah panjang yang menempatkannya sebagai kota terpenting di wilayah tenggara Indonesia. Paparan berikut ini berisi tentang sejarah singkat kota Mataram.

#### **A. Sekilas Sejarah Kota Mataram**

Mengkaji kota Mataram dapat dimulai dengan menilik sejarah kota ini. Tilikan historis atas keberadaan kota Mataram menarik untuk diulas mengingat rekaman sejarah masa silam tersebut terkadang ikut mempengaruhi pola interaksi sosial antar warga kota pada masa-masa berikutnya. Di Mataram, terdapat satu kota penting yang bernama Cakranegara.<sup>29</sup> Kota ini pernah menjadi ibukota

---

<sup>29</sup> Sebagian sumber menyebutkan kata Cakranegara berasal dari kata cakra dan Negara. Cakra artinya roda yang berputar mengendalikan pemerintahan dan mengontrol seluruh sistem kerajaan dan masyarakat. Sebagian ahli mengartikan Cakra sebagai tempat pengajaran agama Hindu. Pembangunan kota diselesaikan pada pertengahan abad ke-18. Lihat Handinoto, "Pola

sekaligus pusat pemerintahan kerajaan Karangasem. Kerajaan Karangasem Hindu Bali yang menguasai Lombok selama kurang lebih satu setengah abad (1740-1894).<sup>30</sup> Sesuai namanya, kerajaan ini berasal dari kerajaan Karangasem Bali yang mampu menaklukkan kerajaan Selaparang Lombok bagian Timur dan selanjutnya mentasbihkan dirinya sebagai penguasa tunggal di pulau Lombok.

Sebagai penguasa tunggal di pulau Lombok, kerajaan Mataram diperintah secara berturut-turut oleh tiga raja keturunan Karangasem yaitu pertama, Raja Anak Agung Ketut Karangasem IV yang memerintah pada tahun 1838 hingga 1850. *Kedua*, Raja Anak Agung Made Karangasem IV yang memerintah pada tahun 1850 hingga 1872. Dan *ketiga* adalah raja Anak Agung Gede Ngurah Karangasem IV yang memerintah pada tahun 1872 hingga 1894.<sup>31</sup>

Posisi kerajaan Mataram Karangasem semakin kuat setelah sukses menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Lombok bagian Barat seperti kerajaan Pagutan, kerajaan Pagesangan, kerajaan Mataram, dan kerajaan Singasari.<sup>32</sup> Kerajaan Mataram Karangasem inilah yang selanjutnya mengembangkan tata ruang kota berdasar subkultur filsafat *Asta Kosala-kosali*.<sup>33</sup> Pada setiap kota dibangun berbagai fasilitas seperti istana raja (puri), tempat

---

Spasial dan Sistem Jalan dari Kota Akranegara dan Probolinggo, Sebuah Perbandingan”, *Dimensi Teknik Arsitektur vol. 27, no. 2, Desember 1999: 21 – 30*

<sup>30</sup> Lihat Fathurahman Zakaria, *Mozaik Budaya Orang Mataram* (Mataram: Yayasan Sumurmas Al-Hamidy, 1998). Alfons van der Kraan, *Lombok: Conquest, Colonization and Underdevelopment, 1870-1940* (Singapore: Heinemann Educational Books Asia, 1980).

<sup>31</sup> Sudirman dan Sukma, Gumi Sasak dalam Sejarah (Selong: Pemda Lombok Timur, 2009), 161-162.

<sup>32</sup> Lalu Mulyadi, *Pola Kota Cakranegara* (Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2000), 1.

<sup>33</sup> Tentang arsitektur rumah dan tempat peribadatan khas Hindu-Bali, selengkapnya lihat Ngakan Ketut Acwin Dwijendra, *Arsitektur Rumah Tradisional Bali, Berdasarkan Asta Kosala-Kosali* (Denpasar: Udayana University Press, 2008); Ngakan Ketut Acwin Dwijendra, *Arsitektur Bangunan Suci Hindu, Berdasarkan Asta Kosala-Kosali* (Udayana University Press, Denpasar, Bali), 2008.

persembahyangan (pura Puseh, pura desa, pura *dalem* dan pura kerajaan yang dikenal dengan pura Meru), tempat pertemuan adat (*bale banjar*), kuburan (*setra*) dan kampung-kampung pemukiman dengan pola lingkaran.<sup>34</sup>

Di pusat lingkaran dibangun istana kerajaan (puri) sebagai tempat tinggal raja dan para bangsawan.<sup>35</sup> Sementara di lingkaran berikutnya dibangun perumahan-perumahan dengan sistem blok berdasarkan strata sosial tertentu sebagaimana yang lazim dalam pembagian kasta warga Bali. Blok pertama diperuntukkan untuk kaum *Brahmana*, blok kedua untuk kaum *Kesatria* dan blok selanjutnya untuk kaum *Sudra*.<sup>36</sup> Setiap warga memperoleh sebidang tanah berbentuk persegi empat yang luasnya rata yakni sekitar 6 – 8 are (600-800m<sup>2</sup>). Lahan perumahan berbentuk persegi empat tersebut sangat ideal sebagai tempat tinggal.<sup>37</sup> Setiap bagian lahan cukup digunakan untuk memenuhi keperluan tiga hal sekaligus yaitu *parahyangan* (membangun pura sebagai tempat bersembahyangan), *pawongan* (hunian) dan *palemahan* (pertanian).<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Lalu Mulyadi, *Pola Kota Cakranegara* (Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2000), 1.

<sup>35</sup> Saat ini beberapa pura bekas peninggalan Kerajaan dijadikan obyek wisata seperti Kompleks Pura Mayura. Selain terdapat pura, di areal kompleks yang luas ini terdapat kolam pemancingan, patung-patung (sebagian patung orang bersorban yang merepresentasikan orang Islam), dan juga kolam renang untuk publik.

<sup>36</sup> Struktur Kasta yang membentuk pelapisan sosial dipengaruhi oleh sistem nilai yang terdiri dari tiga tingkatan yaitu *utama*, *madya* dan *nista*. Sehingga secara berurut melahirkan golongan *Brahmana*, *Kesatria*, dan *Waisya*. Pelapisan sosial ini selanjutnya berpengaruh dalam penggunaan tiga tingkatan bahasa yaitu *alus*, *lumrah (madya)* dan *kasar*. Zulyani Hidayah, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1996), 36-38.

<sup>37</sup> Konsep penggunaan lahan disesuaikan dengan unsur-unsur *atma* (jiwa), *satira* (badan) dan *Trikarya*. Sehingga setiap lahan pekarangan hendaknya digunakan untuk kebutuhan *parahyangan* (tempat ibadah/pura), *pawongan* (tempat hunian), dan *palemahan* (lahan pertanian). Lalu Mulyadi, *Pola Kota Cakranegara* (Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2000), 3.

<sup>38</sup> Lalu Mulyadi, *Pola Kota Cakranegara* (Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2000), 3.

Di sela-sela pemukiman warga Hindu Bali, disediakan perkampungan Muslim untuk warga Sasak. Warga Muslim Sasak yang diizinkan oleh pihak kerajaan untuk tinggal di wilayah tersebut harus memiliki kecakapan khusus. Kecakapan yang dimaksud adalah sejumlah keterampilan warga yang memang dibutuhkan oleh pihak istana kerajaan. Seperti kecakapan merawat senjata, membuat kerajinan emas, merawat gamelan hingga membuat makanan dan minuman. Dengan pola penataan pemukiman seperti itu, wajar jika sekarang ini ada pengelompokan pemukiman berdasar etnis dan agama di Mataram terutama di wilayah Cakranegara. Pengelompokan pemukiman berdasar etnis dan agama ini pada kondisi-kondisi tertentu berpotensi menimbulkan ketegangan dan konflik.

Memasuki paruh kedua abad ke-19, Kerajaan Karangasem mulai kehilangan kekuasaan, terutama setelah Belanda menguasai pulau Lombok. Secara efektif, Mataram dikuasai oleh Belanda sejak tahun 1843 tepatnya setelah ditandatanganinya surat perjanjian *Korte Verklaring* atau “pernyataan pendek” pada tanggal 7 Juli 1843. Dari pihak Belanda diwakili Huskus Koopman. Sedangkan dari pihak kerajaan, surat perjanjian ditandatangani langsung oleh Raja serta beberapa orang Punggawa di Puri Kangingan Mataram. Dalam *perjanjian* tersebut dinyatakan sejumlah hal penting seperti Mataram memberikan pengakuan resmi bahwa seluruh Pulau Lombok adalah milik Belanda dan bahwa Belanda berkuasa atas seluruh pulau Lombok dan Lombok adalah bagian dari Hindia Belanda. Dalam perjanjian itu juga dinyatakan bahwa pihak pemerintah Hindia

Belanda mengakui Raja Mataram sebagai penguasa atas bagian Barat wilayah Pulau Lombok.<sup>39</sup> Sejak saat itulah, secara resmi Lombok dijajah Belanda.

Akibat penjajahan tersebut, kehidupan rakyat Sasak semakin sengsara. Banyak tanah milik rakyat dirampas, dan banyak warga yang harus melakukan kerja paksa. Kesengsaraan ini semakin diperparah dengan tingginya pungutan pajak yang harus dipikul oleh para petani.

Untuk mengukuhkan kekuasaannya, segala taktik dan siasat dilakukan pemerintah kolonial Belanda. Hingga akhirnya pada tahun 1894, Belanda dengan berani menyatakan tidak mengakui kekuasaan raja Mataram dan mulai melakukan langkah-langkah penataan administratif. Di bawah kekuasaan Belanda, status pulau Lombok ditetapkan sebagai wilayah *Afdeling* yang diatur dengan *Staatsblad*, No 185 Tahun 1895 dengan sebutan *Afdeling van Lombok*. *Afdeling* dikepalai oleh seorang asisten residen ibukotanya di Ampenan. *Afdeling* Lombok termasuk bagian dari *Residentie van Bali en Lombok* (Karesidenaan Bali dan Lombok) dengan ibukotanya di Singaraja Bali. Dengan *Staatsblad* NO 185 tahun 1895 itu pula ditetapkan bahwa *Afdeling* Lombok dibagi menjadi dua wilayah *Onder Afdeling* yaitu *Onder Afdeling van Oost Lombok* (Lombok Timur) dengan ibukota di Sisiq (Labuhan Haji) dan *Onder Afdeling van West Lombok* (Lombok Barat) dengan ibukota Mataram. *Onder Afdeling* dikepalai oleh seorang *Controleur*.<sup>40</sup>

Selepas dikuasai Belanda, sebagaimana daerah lain di Indonesia selanjutnya, Lombok dikuasai oleh Jepang sejak tahun 1942. Selain perubahan

---

<sup>39</sup> Jamaludin dkk, Penyusunan Sejarah Kota Mataram. Laporan Akhir Penelitian (Mataram: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram, 2011), 37.

<sup>40</sup> Jamaluddin, Penyusunan Sejarah..., 37.

penataan administrasi pemerintahan, tak banyak cerita menarik yang dapat diungkap pada masa pendudukan Jepang. Satu hal yang pasti, kepedihan dan penderitaan masih menggelayut di pundak orang-orang Sasak Lombok. Secercah harapan mulai mencuat kala Republik Indonesia memproklamkan diri pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada masa kemerdekaan, wilayah Mataram masuk ke dalam wilayah Pemerintah Daerah tingkat II Lombok Barat. Seiring perkembangan kota, sejumlah usaha dilakukan untuk menjadikan Mataram sebagai kota administratif. Dengan berbagai usaha dan pertimbangan, akhirnya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 21 Tahun 1978, terbentuklah Kota Administratif (Kotif) Mataram. Drs. H. L. Mujitahid ditunjuk sebagai Wali Kota Mataram pertama. Selanjutnya Kota Administratif Mataram ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Dati II Mataram, berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1993.<sup>41</sup> Wilayah Mataram saat itu terdiri dari tiga kecamatan yaitu kecamatan Mataram, kecamatan Ampenan dan kecamatan Cakranegara.

Pesatnya pertumbuhan kota menyebabkan perlunya dilakukan pemekaran. Oleh karenanya sejak tahun 2007 wilayah kecamatan di Kota Mataram dimekarkan menjadi enam kecamatan yaitu Kecamatan Mataram, Selaparang, Ampenan, Sekarbela, Cakranegara dan Sandubaya. Di enam kecamatan ini terdapat 50 kelurahan yang terdiri dari 297 lingkungan (setingkat dusun).

---

<sup>41</sup> Menteri dalam negeri kala itu, Moch. Yogi S Memet pada Tanggal 31 Agustus 1993 melantik Drs. H. L. Mas'ud sebagai Wali Kota Mataram. Selengkapnya lihat *Ibid*.



## B. Topografi dan Kependudukan

Kota Mataram berada pada ketinggian kurang dari 50 meter di atas permukaan laut dengan rentang ketinggian sejauh 9 km. Struktur geologi Kota Mataram sebagian besar adalah jenis tanah liat dan tanah endapan *tuff* yang merupakan endapan *alluvial* yang berasal dari aktivitas vulkanik Gunung Rinjani. Secara visual wilayah Mataram terlihat seperti lempengan batu pecah yang di bawahnya terdapat lapisan pasir.

Suhu udara di Kota Mataram berkisar antara 20.4 °C sampai dengan 32.10 °C. Kelembaban maksimum 92% terjadi pada bulan Januari, April, Oktober dan November, sedangkan kelembaban minimum 67% terjadi pada bulan Oktober. Rata-rata penyinaran matahari secara maksimum terjadi pada bulan Februari. Sementara jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan November dengan curah hujan rata-rata mencapai 1.256,66 mm per tahun, dan jumlah hari relatif 110 hari per tahun.

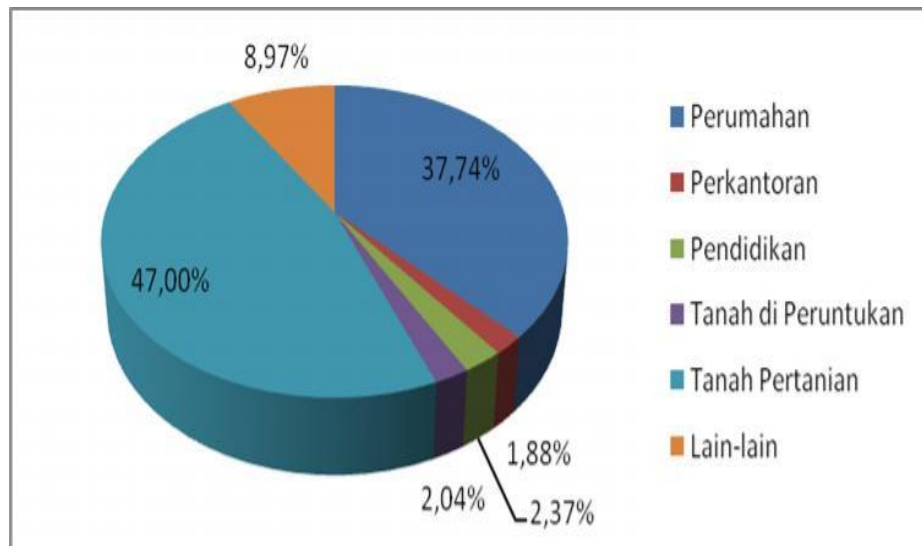
Gambar 3.1  
Peta Kota Mataram



Sebagian besar wilayah kota Mataram merupakan wilayah dataran rendah. Kontur tanah merupakan tanah datar. Posisi Mataram berada dan bersinggungan dengan pantai Ampenan. Di bibir pantai ini dulu terdapat dermaga besar yang menjadi tempat bersandar kapal-kapal dari wilayah Barat Bali maupun Timur, Makasar. Keberadaan Mataram telah lama menjadi pintu masuk perdagangan di NTB. Posisi strategis ini menjadikan Mataram sebagai satu destinasi terpenting urbanisasi penduduk dari daerah lain di Lombok maupun luar Lombok. Dengan urbanisasi seperti ini, tak heran bila penduduk Mataram terhitung sangat padat. Kepadatan penduduk berakibat pada berkurangnya ketersediaan lahan kosong atau lahan hijau.

Hingga tahun 2009, penggunaan lahan di Kota Mataram didominasi oleh kawasan perumahan (37,74%) dan pertanian (47,00%). Dalam perkembangannya, berdasarkan data tahun 2008–2009 terjadi konversi lahan yang cukup besar mencapai sekitar 4.80 Ha/tahun. Kondisi seperti ini berakibat pada berkurangnya lahan pertanian dan area terbuka hijau. Padahal sebagaimana diketahui, kebutuhan akan ruang terbuka hijau merupakan sesuatu yang urgen bagi warga kota. Tentang persentase penggunaan lahan sebagaimana tampak dalam grafik berikut ini.

Grafik 2.1  
Komposisi Penggunaan Lahan di Kota Mataram  
Tahun 2009



Sumber: Dinas PU Kota Mataram, 2009

Terkait dengan kondisi kependudukan, berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Kota Mataram mencapai 402,3 ribu jiwa (terdiri dari 198,9 ribu laki-laki dan 203,4 ribu perempuan). Tingkat penyebaran penduduk di Kota Mataram tidak merata di semua kecamatan. Kecamatan Ampenan dan kecamatan Mataram adalah kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, masing-masing 78,6 ribu jiwa dan 72,9 ribu jiwa. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah kecamatan Sekarbela, yaitu sebesar 53,1 ribu jiwa. Oleh karenanya, kepadatan penduduk tertinggi berada di kecamatan Ampenan yakni sebesar 19,55%. Kepadatan penduduk berikutnya secara berturut-turut berada di kecamatan Mataram yakni sebesar 18,13%, kecamatan Selaparang sebesar 18,06%, kecamatan Cakranegara sebesar

15,91%, kecamatan Sandubaya sebanyak 15,14 %. Sedangkan kepadatan terkecil berada kecamatan Sekarbela yakni sebesar 13,21 %.

Dengan luas wilayah sekitar 61,30 kilo meter persegi, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Mataram sebesar 6,6 ribu jiwa per kilo meter persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatannya adalah kecamatan Ampenan sebesar 8,3 ribu jiwa per kilo meter persegi, sedangkan kecamatan yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya adalah kecamatan Sekarbela yaitu sebesar 5,2 ribu jiwa per kilo meter persegi.

Secara umum, rasio perbandingan jenis kelamin penduduk Kota Mataram adalah sebesar 98. Artinya jumlah penduduk perempuan 2 persen lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Sex rasio terbesar terdapat di kecamatan Ampenan yakni sebesar 101 dan yang terkecil terdapat di kecamatan Mataram yaitu sebesar 95. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel rasio jumlah penduduk berikut ini.

Tabel 3.1

Rasio Jumlah Penduduk

No	Kecamatan	Jumlah penduduk (000 jiwa)			Seks Ratio
		Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Ampenan	39,6	39,1	78,7	101
2	Sekarbela	26,2	27,0	53,1	97
3	Mataram	35,6	37,3	72,9	95
4	Selaparang	35,5	37,1	72,6	96
5	Cakranegara	31,6	32,4	64,0	98
6	Sandubaya	30,4	30,5	60,9	100
Jumlah Total		198,9	203,4	402,3	98

Sumber :Sensus Penduduk 2010 BPS Kota Mataram

Laju pertumbuhan penduduk Kota Mataram pertahun dalam sepuluh tahun terakhir (2000 s/d 2010) sebesar 1,96 persen. Dari data statistik, laju pertumbuhan penduduk kecamatan Sekarbela adalah yang tertinggi dibandingkan dengan kecamatan yang lain yaitu 3,94 persen. Adapun laju pertumbuhan penduduk yang terendah terdapat di kecamatan Selaparang yakni sebesar 0,41 persen. Kecamatan Ampenan, walaupun menduduki jumlah penduduk tertinggi namun dari sisi laju pertumbuhan penduduk menempati urutan ke-empat yakni 2,00 persen. Jumlah penduduk apabila dibagi dengan jumlah Rumah Tangga akan menghasilkan rata-rata anggota rumah tangga. Jumlah rumah tangga berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 di Kota Mataram berjumlah 111.436 rumah tangga. Ini artinya bahwa banyaknya penduduk yang menempati satu rumah rata-rata sebanyak 4 orang. Rata-rata anggota rumah tangga di setiap kecamatan berkisar antara 3 orang sampai dengan 4 orang.

Tabel 3.2

Jumlah Rata-rata Anggota Keluarga berdasar Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Rumah tangga (000)	Jumlah penduduk (000)	Rata-rata Anggota Rumah tangga
1	Ampenan	20,7	39,1	4
2	Sekarbela	15,7	27,0	3
3	Mataram	19,3	37,3	4
4	Selaparang	22,6	37,1	3
5	Cakranegara	17,0	32,4	4
6	Sandubaya	16,1	30,5	4
Jumlah Total		111.4	402,3	4

Sumber :Sensus Penduduk 2010 BPS Kota Mataram

Sebagai kota termaju di propinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram termasuk kota multikultur. Hampir semua suku bangsa hidup di kota yang juga

menjadi ibukota propinsi Nusa Tenggara Barat ini, seperti suku Sasak, Bali, Samawa, Arab, Cina, Jawa, Bugis dan lain-lain. Suku terbesar adalah suku Sasak, penduduk asli pulau Lombok. Berikutnya suku Samawa yang berasal dari Bima, Dompu dan Sumbawa. Suku Jawa dan Bali banyak menempati pusat kota. Suku Bali yang beragama Hindu merupakan penduduk yang banyak mendiami wilayah Cakranegara. Sebagian besar suku Bali adalah keturunan punggawa kerajaan Karangasem yang pernah memerintah pulau Lombok.

Posisi Mataram yang berada dekat dengan kawasan pantai menjadikan Mataram termasuk salah satu destinasi wisata yang paling banyak diminati wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun domestik. Dengan posisi seperti ini, Mataram juga menjadi pintu gerbang bagi tujuan-tujuan wisata ke tempat lainnya di pulau Lombok.

Sebagai ibukota propinsi, hampir semua kantor seperti kantor Gubernur, kantor DPRD pemerintahan berada di maupun kantor milik swasta berada di kota yang memiliki motto "*Maju, Religius dan Berbudaya*" ini.<sup>42</sup> Selain itu, berbagai pusat perbelanjaan modern juga tumbuh di kota Mataram. Lembaga pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi saat ini juga menjamur di kota Mataram. Keberadaan lembaga pendidikan ini, menarik

---

<sup>42</sup> Penjelasan lebih rinci mengenai motto kota adalah sebagai berikut. Maju ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kota yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk di dalamnya seni dan sosial budaya, sehingga kemajuan yang dicapai dengan landasan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Mataram. Religius diartikan sebagai terciptanya masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, mengedepankan *muammalah* serta toleransi yang tinggi antar umat beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan masyarakat madani. Berbudaya diartikan sebagai terciptanya keseimbangan antara kemajuan dan religiusitas yang saling berterima dalam kemajuan dan kemajemukan, menguatnya jati diri serta mantapnya budaya lokal yang ditandai dengan masyarakat yang bermoral, bermartabat dan berkesadaran hukum berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma, adat istiadat serta peraturan yang berlaku dalam bingkai masyarakat madani. Lihat Buku Saku Kota Mataram tahun 2011. Buku Saku Kota Mataram Tahun 2011, diterbitkan oleh Pemerintah Kota Mataram

dicermati mengingat sebagian lembaga pendidikan didirikan atas dasar semangat keagamaan. Banyak lembaga pendidikan tersebut dikelola oleh organisasi atau yayasan keagamaan.

### C. Sosial Keagamaan

Sebagaimana dipaparkan di bagian lain tulisan ini, bahwa masyarakat Mataram merupakan masyarakat multikultur, multi etnis dan multi agama. Dari sisi keagamaan, mayoritas penduduk Kota Mataram beragama Islam (352.021), Hindu (39.575), Katolik (3.104), Kristen (3.855), Budha (1.601) dan Konghucu (1.145). Komposisi penduduk berdasar agama selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.3

Jumlah Pemeluk Agama Di Kota Mataram Tahun 2010

	Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Jumlah
1	Mataram	59.106	776	1.040	12.185	120	40	73.267
2	Selaparang	65.253	597	361	6.030	245	-	72.486
3	Cakranegara	48.41.5	1.236	671	13.266	621	215	64.424
4	Sandubaya	53.457	617	467	5.140	193	321	60.195
5	Ampenan	75.293	527	515	1.570	343	551	78.799
6	Sekarbela	51.497	102	50	1384	79	18	53.130
Jumlah		352.021	3.855	3.104	39.575	1.601	1.145	402.301
Persentase		87 %	1 %	1 %	10 %	0,3 %	0,2 %	100 %

Sumber :Sensus Penduduk 2010 BPS Kota Mataram

Kegiatan keagamaan marak berlangsung di kota Mataram. Hal ini dapat dilihat salah satunya dari banyaknya keberadaan sarana tempat ibadah masing-

masing agama. Hampir semua tempat ibadah terlihat di kota Mataram. Sarana tempat ibadah yang paling banyak terlihat adalah masjid. Keberadaan masjid tidak hanya terdapat di kota Mataram melainkan juga terdapat di seluruh penjuru pulau Lombok. Maka wajar jika pulau Lombok terkenal dengan sebutan “pulau seribu masjid”.

Pola pembangunan masjid rata-rata dilakukan secara gotong royong. Masyarakat secara swadaya dan swadana membangun masjid yang ada di lingkungan masing-masing. Antusiasme masyarakat dalam membangun masjid menyebabkan di hampir setiap lingkungan (setingkat dusun) berdiri 2 sampai 3 buah masjid seperti nampak di kawasan Dasan Agung.

Di kampung yang berjarak kurang dari 2 km dari kantor Gubernur NTB ini hampir setiap lingkungan memiliki lebih dari satu masjid. Karena jumlah masjid lebih dari satu, maka untuk kegiatan salat Jumat harus dilakukan secara bergantian dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya. Sebagai contoh jika Minggu pertama, salat Jumat diadakan di masjid Gapuk, maka *jumatan* berikutnya diadakan di masjid Pelita. Pada Jumat ketiga dan keempat, secara berturut-turut salat Jumat diadakan di masjid Perigi atau Pejeruk Timur. Demikian seterusnya, sehingga setiap masjid memiliki kesempatan yang sama untuk diadakan salat Jumat.



Tabel 3.4

## Data Sebaran Tempat Peribadatan

No	Kec	I s l a m					Gereja	Pura	Wihara
		Masjid	Musala	Ponpes	Majlis Taklim	TPQ			
1	Mataram	41	64	7	25	11	2	34	-
2	Selaparang	53	80	-	40	37	3	6	-
3	Ampenan	22	62	6	10	28	3	8	2
4	Sekarbela	34	32	2	25	31	-	2	-
5	Cakranegara	55	40	4	10	31	4	109	2
6	Sandubaya	39	72	4	62	50	-	11	1
J u m l a h		244	350	23	172	188	12	170	5

Sumber: Diolah dari Data Emis Kemenag Provinsi NTB 2009

Fenomena banyaknya masjid di Kota Mataram merupakan satu hal yang menarik untuk dicermati. Secara teologis, antusiasme masyarakat Muslim Mataram dalam membangun masjid sangat terkait dengan ajaran agama Islam yang menganjurkan umatnya untuk mendirikan dan memakmurkan masjid. Salah satunya adalah anjuran dalam al-Quran surat Al-Taubah ayat 18<sup>43</sup>. Ayat ini biasanya sering disampaikan para khatib dan ustad dalam khotbah Jumat maupun pengajian agar umat Islam berlomba-lomba membangun masjid dan memakmurkannya. Ayat ini biasanya dirangkai dengan hadis Nabi, *“man banā masjidan, bana Allāhu buyūtan fi al-jannah”* (barang siapa membangun masjid, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah-rumah di surga).

<sup>43</sup> Artinya “Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”.

Sedangkan secara sosiologis, tingginya animo masyarakat dalam membangun masjid juga bisa dilihat sebagai semacam kontestasi dari banyaknya Pura (tempat persembahyangan umat Hindu) di kota Mataram. Seperti terlihat di lingkungan-lingkungan Hindu, hampir setiap rumah warga Hindu memiliki pura. Mulai dari Sanggah, pura yang ada di tiap keluarga. Pura Maksan di tingkat lingkungan hingga pura Dalem yang ada di tingkat banjar (setingkat kecamatan). Jumlah pura yang ada di kota Mataram jauh lebih banyak dari catatan statistik yang ada di Kementrian Agama.

Kuatnya nuansa keagamaan baik di komunitas Hindu maupun Islam menjadikan Mataram memilih jargon kota “Maju, Religius dan Berbudaya”. Pihak pemerintah kota berupaya membangun kota dengan visi menyeimbangkan antara keagamaan dan kemajuan atau modernitas. Pembangunan dan kemajuan kota diharapkan bernafaskan nilai-nilai agama sekaligus memperhatikan kearifan lokal masyarakat. Berbagai kegiatan keagamaan bersekala besar sering berlangsung di Mataram. Di kota ini sering digelar acara besar keagamaan seperti Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) untuk umat Islam dan Utsawa Dharma Gita (UDG) untuk umat Hindu. Kegiatan Utsawa Dharma Gita (UDG) tingkat Nasional VIII bahkan pernah diselenggarakan di kota Mataram ini.<sup>44</sup>

Nuansa keagamaan juga dapat dilihat dari semangat masyarakat kota dalam memperingati hari-hari besar keagamaan. Bagi kalangan Muslim Lombok, kegiatan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dilakukan secara

---

<sup>44</sup> Berbagai lomba sudah digelar mengiringi pelaksanaan UDG di antaranya lomba pembacaan sloka, dharma wacana, palawak dan parade kidung. Berbagai jenis lomba yang digelar lokasinya tersebar. Seperti lomba pembacaan *sloka* dipusatkan di *Jaba Pisan* Pura Meru, kemudian lomba dharma wacana di *Jaba Kalih* Pura Meru. Selanjutnya parade kidung di Taman Mayura dan pelawak yang dilaksanakan di Taman Budaya, Mataram.

unik dan khas. Hampir setiap keluarga, mengadakan tasakuran dengan memasak aneka makanan dan jajanan. Selain disantap di rumah dan mengundang sanak saudara, rekan kerja dan teman, tasakuran juga diadakan di masjid. Perayaan maulid Nabi di Mataram, dan di hampir seluruh wilayah Lombok, berlangsung sangat meriah. Selain pengajian umum, setiap remaja dan takmir masjid biasanya juga menggelar aneka perlombaan yang diikuti oleh anak-anak dan remaja. Seperti Musabaqoh *Qira'atil Qur'an* (lomba membaca al-Qur'an dengan lagu indah), puitisasi al-Qur'an, lomba pidato dengan tema-tema keislaman, panjat pinang (*Jorakan*) dan lain-lain.

Semarak keagamaan juga semakin terasa manakala Ramadhan tiba. Berbagai pengajian untuk menyambut datangnya bulan suci bagi umat Islam ini digelar di setiap masjid. Setiap hari, terutama di malam hari selama bulan Ramadhan, pembacaan ayat suci al-Quran (*tadarus*) dilakukan di masjid-masjid dengan menggunakan *loud speaker*. Tadarus biasanya dilakukan selepas salat Isak dan Tarawih hingga larut malam. Suasana semakin meriah menjelang hari raya Idul Fitri. Di malam tanggal satu Syawal biasanya diadakan takbir keliling dan pawai lampion. Dalam kegiatan pawai dan takbir keliling tersebut, setiap lingkungan menampilkan berbagai kreasi seperti membuat miniatur masjid, miniatur al-Qur'an yang dihiasi lampion warna-warni.

Seolah tidak mau ketinggalan dengan umat Islam, geliat keberagaman umat Hindu sebagai umat mayoritas kedua di Mataram juga tak kalah semarak. Berbagai upacara hari besar agama Hindu seperti Sarawasti, Galungan, Kuningan, Pujawali atau pawai ogoh-ogoh berlangsung meriah dan khidmat. Seperti ketika

perayaan hari Nyepi misalnya, hampir tiap gang yang ada di perkampungan Hindu ditutup dan dijaga oleh *pecalang*. Pada saat Nyepi berlangsung, kondisi kota sangat sunyi dan sepi. Keadaan ini kerap menimbulkan perasaan tidak senang oleh penganut agama lain. Sebagian warga non-Hindu terkadang menyampaikan keluhan kurang bebas beraktifitas. “Kalau pas Nyepi, kita dilarang cari makan keluar”, demikian keluh Joni dan Eka warga yang kos di kampung Karang Jasi dan Karang Lede.

Menanggapi keluhan seperti ini sebagian besar warga Hindu menyatakan bahwa seharusnya mereka menghargai tradisi agama Hindu. Dalam sebuah *focus group discussion* (FGD), seorang peserta yang bernama Niluh menyatakan “*Kan cuma sekali setahun. Itu pun jauh-jauh hari sudah dipermaklumkan. Jika ada yang di luar Hindu sebaiknya mencukupi kebutuhannya sebelum Nyepi berlangsung*”.

Sehari sebelum Nyepi, masyarakat Hindu setiap tahun rutin menggelar pawai ogoh-ogoh. Sebuah pawai keliling kota Mataram dengan mengarak boneka raksasa yang bentuknya sangat beragam. Sebagian besar boneka yang terbuat dari material kertas bekas ini berbentuk buta kala. Setelah diarak keliling kota, boneka-boneka tersebut selanjutnya dibakar sebagai simbol sirnanya angkara murka. Kegiatan pawai ogoh-ogoh ini selain melibatkan hampir semua *banjar* Bali di wilayah Mataram, tak jarang juga melibatkan sebagian warga Muslim. Untuk meramaikan kegiatan tahunan ini, panitia pawai sering mengundang kelompok-kelompok musik tradisional Sasak untuk ikut mengiringi. Sebagai contoh adalah keterlibatan grup musik “Taruna Nunggal” dari Narmada Lombok Barat. Keterlibatan warga Muslim dalam pawai tersebut memperlihatkan bahwa relasi

sosial dan toleransi berlangsung cukup baik antara komunitas Hindu dan Muslim di Kota Mataram.

Harmoni antar pemeluk agama menjadi hal penting yang dikembangkan oleh pemerintah kota Mataram. Masyarakat kota Mataram yang multikultur diharapkan dapat hidup berdampingan secara rukun. “Kota Mataram ini bisa dikatakan sebagai miniatur dari Indonesia, semua agama dan suku ada disini. Bahkan di daerah Monjok menjadi *icon* kerukunan kita, di mana Masjid bersebelahan dengan Pura, tidak pernah terjadi gesekan, karena kita saling menghormati” papar H. Badrun, Ketua FKUB Kota Mataram.<sup>45</sup>

#### **D. Sosial Ekonomi**

Dari sisi ekonomi, kondisi ekonomi Mataram relatif lebih baik dibanding wilayah lain di propinsi NTB. Salah satu indikator untuk menilai kondisi ekonomi tersebut adalah Produk Domestik Regional Brutto (PDRB). Seperti dipublikasikan oleh BPS Kota Mataram, PDRB Kota Mataram pada triwulan IV-2010 mencapai Rp. 1,241 triliun.

Rincian mengenai Produk Domestik Regional Brutto tersebut sebagaimana tertera dalam table berikut ini.

---

<sup>45</sup> Disampaikan pada kegiatan pembukaan “Sosialisasi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Mataram Tahun 2015”. Selengkapnya lihat <http://ntb.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=297510>.

**Tabel 3.5**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Lapangan Usaha di Kota Mataram Tahun 2008-2010**

Lapangan Usaha	2008		2009		2010 *)	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pertanian	164.891,34	4,55	173.741,72	4,20	47.968,60	3,86
Pertambangan dan Penggalian	1.420,30	0,04	895,85	0,02	202,34	0,02
Industri Pengolahan	366.763,72	10,12	430.190,96	10,39	149.397,72	12,04
Listrik, Gas & Air Bersih	40.374,79	1,11	47.488,46	1,15	9.338,19	0,75
Bangunan	276.117,54	7,62	346.163,59	8,36	115.958,24	9,34
Perdagangan Hotel &	710.506,66	19,60	825.078,54	19,93	230.381,20	18,56
Pengangkutan & Komunikasi	1.101.329,59	30,39	1.192.868,40	28,81	351.526,18	28,32
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	552.271,19	15,24	634.041,99	15,31	196.878,95	15,86
Jasa-Jasa	410.662,71	11,33	489.883,15	11,83	139.500,75	11,24
<b>Jumlah</b>	<b>3.624.337,84</b>	<b>100</b>	<b>4.140.352,66</b>	<b>100</b>	<b>1.241.152,17</b>	<b>100</b>

\*) data pada Triwulan IV tahun 2010. Sumber: BPS Kota Mataram, 2011

Indikator ekonomi juga dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh laju pertumbuhan ekonomi kota Mataram pada triwulan IV-2010 tumbuh sebesar 0,10 persen. Kondisi ini tampaknya terpengaruh oleh kondisi pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB pada triwulan IV-2010 yang mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar -1,54 persen dari triwulan sebelumnya. Di tahun 2010, sejumlah sektor mengalami peningkatan pertumbuhan. Salah satunya yang terbesar adalah sektor bangunan sebesar 7,85

persen. Sedangkan sektor jasa, serta sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang melambat. Adapun sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel & restoran, serta sektor bangunan mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram diikuti dengan fluktuasi laju inflasi. Data tiga tahun terakhir, laju inflasi di Kota Mataram mengalami penurunan dari 13,29% pada tahun 2008 menjadi 3,14% pada tahun 2009. Laju inflasi kembali tinggi pada tahun 2010 yang naik menjadi 7,48%.<sup>46</sup>

Selain PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi, patut diperhatikan adanya indikator makro ekonomi lainnya seperti kondisi pendidikan dan kesehatan masyarakat. Menarik untuk dicatat, meskipun tingkat inflasi di Mataram dapat ditekan dan laju pertumbuhan ekonomi meningkat dari tahun ke tahun, namun hal ini masih belum memberi pengaruh signifikan bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin kota.

Tabel berikut ini memberi gambaran secara jelas bahwa persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih relatif tinggi yakni sebesar 20% di tahun 2010. Angka ini hanya menyusut kurang dari setengah persen di tahun 2011 yang mencapai 19,59%. Masih belum membaiknya kondisi makro ekonomi berakibat pada belum terdongkraknya IPM Mataram. Sesuai tabel berikut IPM kota Mataram masih belum beranjak dari angka 70.

---

<sup>46</sup> Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram tahun 2012 (Mataram: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram, 2012).

Tabel 3.6  
Perkembangan Indikator Makroekonomi Kota Mataram

No	Indikator Makro Pembangunan	Tahun		
		2009	2010*	2011**
1.	Pertumbuhan PDRB	8,32 %	7,92 %	7,83 %
2.	Laju Inflasi	10,23 %	10,02 %	3,36 %
3.	PDRB (Rp)			
	Menurut harga berlaku	4.047.840	4.569.754	4.569.754
4.	PDRB per kapita (Rp)			
	Menurut harga konstan	5.397.496	5.692.740	5.692.740
5.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	375.506	402.254	438.457
6.	Jumlah Penduduk (KK)	105.560	116.116	126.567
7.	Persentase penduduk dibawah garis	18 %	20 %	19,59 %
8.	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,06 %	1,10 %	1,09 %
9.	Angka Melek Huruf	92 %	90 %	99,54 %
10.	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	66	66,25	66,64
11.	Angka kematian bayi (1/1000 jiwa)	40,51	40	40,82
12.	Angka Rata-Rata lama Sekolah (Tahun)	9,5	10	10
13.	Angka Partisipasi			
	Sekolah (%)	95	97	>105.27
	- Usia 7 -12	97	99	> 114.19
	tahun	72	73	> 116.96
14.	Tingkat pengangguran terbuka	10,78 %	10 %	10 %
15.	IPM (Indeks)	<b>72,5**</b>	<b>72,99</b>	73

\* Angka Sementara dari BPS Kota Mataram.

\*\* Angka Proyeksi RPJMD Kota Mataram 2010-2015.

Persoalan ekonomi lainnya yang berpotensi mempengaruhi kondisi sosial kota Mataram adalah tingginya tingkat pengangguran. Problem ketenagakerjaan melibatkan dua aspek yaitu penyediaan lapangan kerja/usaha dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Berdasarkan data BPS, tingkat



pengangguran terbuka di Kota Mataram sebesar 10,78% pada tahun 2009. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan kondisi pada tahun 2008 yang mencapai 11,89%. Hal menarik lainnya, bergesernya lapangan pekerjaan sektor pertanian ke sektor industri, dan perdagangan, mengindikasikan bahwa Kota Mataram menuju perekonomian modern.

Jumlah tenaga kerja di Kota Mataram secara umum meningkat baik di sektor formal maupun informal. Sebagai gambaran, pada 2009 jumlah penduduk usia kerja (di atas 15 tahun) sebesar 272.128 jiwa dengan jumlah angkatan kerja sebesar 8.561 jiwa. Berdasarkan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) setiap tahun meningkat sebesar 3,30% yang artinya dari seluruh jumlah penduduk usia produktif di Kota Mataram yang aktif secara ekonomi sebesar 3,30%.<sup>47</sup>

Tabel 3.7

Jumlah Pencari Kerja Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2009

<b>Pendidikan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
SD/MI	9	6
SMP/MTs	58	12
SMA/SMK/MA	953	672
D-I dan D-II	30	19
D-III	156	270
Perguruan Tinggi	798	876
<b>Jumlah</b>	<b>2.004</b>	<b>1.855</b>

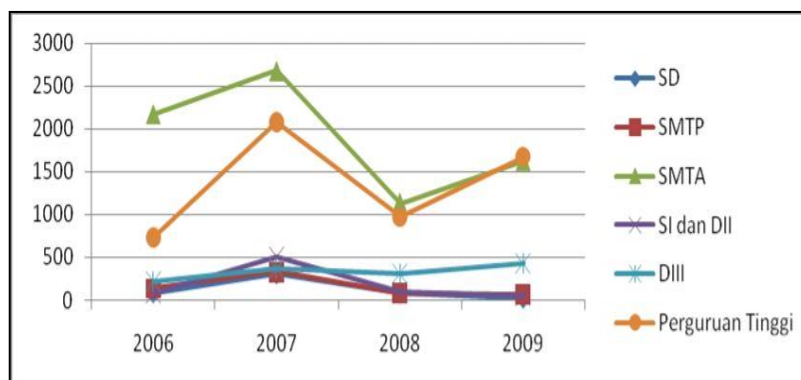
*Sumber: BPS Kota Mataram, 2010.*

<sup>47</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011 - 2015.

Berikutnya berdasarkan Hasil Survei Ekonomi Daerah Kota Mataram tahun 2009, tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Mataram sebesar 57,25%. Selama kurun waktu empat tahun terakhir, jumlah pencari kerja dengan jenjang pendidikan SMA/SMK/MA menduduki tempat tertinggi. Disusul kemudian oleh lulusan Perguruan Tinggi dan Diploma Tiga (D-III). Secara lebih rinci mengenai gambaran para pencari kerja di Kota Mataram dapat dilihat pada Grafik 2.2 berikut ini.

Grafik 3.2.

Jumlah Pencari Kerja Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Mataram Tahun 2006 s/d 2009



Sumber: BPS Kota Mataram, 2010.

### E. Pendidikan, Kesehatan dan Politik

Kondisi pengembangan pendidikan di kota Mataram cukup baik. Beberapa indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH), Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Pendidikan yang ditamatkan.

APK adalah persentase anak usia sekolah yang memperoleh kesempatan pendidikan. APK SMP dan SMA mulai tahun 2008-2010 telah mencapai angka 100 %.

Tabel 3.8  
Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Indikator Pendidikan

No	Uraian	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Angka Melek Huruf	91,80%	91,80%	92%	95,50%	95,50%
2.	Rata Lama sekolah	8,40	9,05	9,05	9,2	9,50
3.	Angka Partisipasi Kasar					
	- SD/MI/Paket A	108,30	105,67	107,45	108,36	108,98
	- SMP/MTs/Paket B	94,04	96,21	101,18	101,94	101,66
	- SMA/SMK/MA/Paket C	69,75	72,28	75,46	100,28	101,64
4.	Angka Partisipasi Murni					
	- SD/MI/Paket A	94,82	96,06	96,38	95,86	97,50
	- SMP/MTs/Paket B	72,12	74,31	72,93	77,48	76,64
	- SMA/SMK/MA/Paket C	54,15	52,39	57,43	71,32	71,79
5.	Angka Pendidikan yang ditamatkan	91,22%	94,35%	96,35%	96,51%	96,51%

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Mataram,

2010

Dari tabel di atas terlihat bahwa angka pendidikan yang ditamatkan belum dapat menjangkau 100%, hal ini menunjukkan bahwa masih adanya peserta didik yang belum dapat menuntaskan pendidikannya. Namun selama periode 2005-2010 angka pendidikan yang ditamatkan mengalami peningkatan dari 91,22% pada 2005 menjadi 96,51% pada 2009.

Dari sisi kesehatan, selama lima tahun terakhir derajat kesehatan masyarakat menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator bidang kesehatan, antara lain: angka kematian bayi, umur

harapan hidup, dan prevalensi gizi buruk. Jabaran lebih rinci mengenai hal ini sebagaimana tampak pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.9**  
**Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial**  
**Indikator Kesehatan**

No	Uraian	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Angka Kematian Bayi	42,89	42,00	41,58	41,25	-
2.	Umur Harapan Hidup		64,7	64,9	65,66	65,15
3.	Prevalensi Gizi buruk	7,20%	3,60%	2,71%	1,51%	-

*Sumber : Data Olahan Dinas Kesehatan Kota Mataram, 2010*

Angka kematian bayi selama empat tahun mengalami penurunan dari 42,89 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2005 menjadi 41,25 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2008. Kenyataan ini patut diapresiasi karena menunjukkan adanya peningkatan pelayanan kesehatan. Umur Harapan Hidup Kota Mataram di Kota Mataram mencapai 65 -66 tahun. Selama kurun lima tahun terakhir prevalensi gizi buruk mengalami penurunan dari tahun 2005 sebesar 7,20 % menjadi hanya sebesar 1,51 % Tahun 2008.

Selain organisasi partai politik, sejumlah organisasi masyarakat berbasis keagamaan baik Islam maupun Hindu berkembang cukup baik di kota Mataram. Di komunitas Muslim misalnya berkembang organisasi seperti Nahdlatul Wathan (NW), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah (kesemuanya lengkap dengan struktur organ di bawahnya seperti Himmah untuk NW, Pemuda Anshor, Muslimat). Sedangkan di komunitas Hindu, masyarakat tergabung dalam

Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).<sup>48</sup> Untuk konteks Mataram, struktur PHDI ini efektif hingga tingkat desa.

Adapun di tingkat pemuda dan mahasiswa terdapat organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan (HIMMAH NW), IMM dan lain-lain. Sementara untuk kalangan generasi muda Hindu berdiri Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI). Adapun organisasi lintas umat beragama berdiri Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Selain FKUB, semua organisasi keagamaan ini dapat dikategorikan sebagai organisasi yang bersifat *bonding*, membangun ikatan solidaritas di tingkat internal kelompok. Sedangkan organisasi semacam FKUB karena sifatnya lintas agama idealnya mampu menjembatani (*bridging*) relasi antar komunitas.

Keterlibatan warga masyarakat dalam organisasi sosial seperti di atas ditambah partisipasi mereka dalam pemilu lima tahunan merupakan indikator penting tumbuhnya budaya kewargaan. Keterlibatan warga dalam organisasi sukarela, selain merupakan manifestasi dari tradisi berasosiasi, juga merupakan modal penting bagi terbangunnya kerjasama antar warga. Sikap dan perilaku warga seperti ini ditambah kesediaan mereka berpartisipasi dalam pemilu merupakan

---

<sup>48</sup> PHDI merupakan organisasi resmi keagamaan yang menyatukan seluruh komponen Hindu yang ada di Indonesia. Kehadiran PHDI juga dimaksudkan untuk secara tidak langsung menegaskan dan sebisa mungkin mendekatkan keyakinan teologis Hindu sesuai dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebuah konsep monoteisme yang berbeda dengan Hindu yang ada di India. Lihat Freck L. Bakker, "Balinese Hinduism and the Indonesian State: Recent Developments", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel* 153, 1ste Afl. (1997): 15-41. Published by: KITLV, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies <http://www.jstor.org/stable/27864809>. (diakses tanggal 01 Nopember 2015)

sebagian indikator diterimanya demokrasi di Mataram. Penjelasan lebih mendalam mengenai hal-hal ini selengkapnya dipaparkan pada bab empat berikut ini.

### **BAB III**

## **PANDANGAN PEMIMPIN LINTAS AGAMA**

### **TENTANG KONFLIK**

#### **D. Elit Agama di Mataram**

Seperti dipaparkan pada bab terdahulu, kota Mataram memiliki jargon yang berbunyi “Maju, Relijius dan Berbudaya”. Melalui jargon seperti ini, visi dan orientasi pembangunan diarahkan untuk menjadikan kota Mataram sebagai kota yang modern, tetapi tetap berpegang pada nilai-nilai agama dan terus berusaha menjaga serta mengembangkan budaya lokal. Keinginan untuk tetap menjadikan kota yang dinafasi oleh nilai-nilai agama, membuat keberadaan para pemimpin agama sebagai kelompok elit yang sangat diperhitungkan. Demikian halnya dengan mengusung jargon berbudaya, para tokoh adat juga menjadi tokoh yang diperhitungkan.

Pemimpin agama memiliki peran penting dalam dinamika kehidupan masyarakat kota Mataram. Selain urusan keagamaan, pemimpin informal ini masih memiliki andil di bidang sosial budaya dan politik. Di bidang agama, jelas kehadiran pemimpin agama menjadi penuntun aktifitas keberagamaan umatnya. Di bidang sosial budaya, para pemimpin ini memiliki posisi tersendiri di kalangan umat terutama pada upaya mensinergikan unsur agama dan budaya. Sedangkan pada bidang politik, sebagian besar pemimpin agama masih menjadi rujukan masyarakat dalam menentukan pilihan-pilihan politik. Tidaklah mengherankan

bila banyak politisi yang ingin mendapat dukungan dari masyarakat kerap menggandeng pemimpin agama. Pada titik ini banyak diantara tokoh agama menjadi semacam *vote getter* (pendulang suara) pada proses-proses politik di tingkat lokal. Tentu diperlukan kajian lebih mendalam mengenai peran-peran mereka pada ranah-ranah tersebut.

Di internal umat Islam, pemimpin agama disebut Tuan Guru, Kyai, Penghulu dan Ustadz. Tuan Guru adalah sebutan atau gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka yang telah menunaikan ibadah Haji ke Makkah, mempunyai kemampuan di bidang ilmu agama seperti aqidah, fiqh praktis, dan tasawuf. Untuk mendakwahkan ajaran agama Islam, atau mengajarekan ilmu-ilmu agama yang dimiliki, tuan guru biasanya mendirikan lembaga pendidikan berupa madrasah atau pondok pesantren. Di beberapa daerah di Indonesia sebutan untuk pemimpin agama Islam berbeda-beda. Di Jawa Barat biasa disebut Ajengan, di daerah Jawa Timur atau Jawa Tengah disebut Kyai. Adapun kyai di Lombok tingkatannya lebih rendah dari tuan guru. Kyai biasanya mereka yang terbiasa menjadi pemimpin salat (imam) di Masjid, memimpin acara berdzikir/*yasinan*, *selakaran* atau acara-acara selamatan di kampung. Sedangkan penghulu adalah mereka yang biasanya bertindak menikahkan pasangan calon pengantin. Sebutan-sebutan ini berasal dari masyarakat, bukan pemberian suatu institusi tertentu. Selain itu gelar formal kesarjanaan atau gelar yang diberikan oleh komunitas adat. Masyarakat lah yang memberikan gelar kepada pemimpin agama.

Di luar komunitas Muslim, pemimpin agama dipanggil dengan sebutan yang berbeda-beda. Di kalangan umat Hindu, tokoh agama lazim dipanggil



dengan sebutan Pedanda, Pandita dan Sulinggih. Di kalangan umat Budha pemimpin agama biasanya disebut Bhiksu (untuk laki-laki) atau Bhiksuni (untuk pemimpin perempuan). Selain itu juga terdapat sebutan Pandita, seperti agama Hindu. Untuk pemimpin agama Katolik, terdapat sebutan Romo, Uskup, Paus, Biarawan (laki-laki) atau Biarawati (perempuan). Gelar yang hampir sama juga terdapat pada agama Kristen. Sedangkan di internal umat Kong Hu Cu, terdapat sebutan Jiao Sheng (Penebar Agama), Wen Shi (Guru Agama), Xue Shi (Pendeta), Zhang Lao (Tokoh Sesepeuh).

Ada perbedaan peran dan otoritas para pemimpin agama di komunitas masing-masing. Tingkat partisipasi, kepatuhan atau ketaatan umat terhadap pemimpin agama mereka relatif berbeda-beda. Berkaitan dengan posisi dan peran pemimpin agama, Gusti Lanang, tokoh agama Hindu, menyatakan:

“Secara sosiologis agak berbeda tokoh agama dalam Hindu bila dibandingkan dengan Muslim. Di Mataram (komunitas Hindu: penulis) tidak ada *formal leader* yang dipercaya untuk menyampaikan dengan *power full* layaknya tuan guru yang memiliki jamaah yang dapat mendengarkan dan mengikutinya. Sehingga tidak ada pedande yang dipercaya sepenuhnya sehingga kekuatan nilai yang disampaikan itu berbeda”.<sup>49</sup>

Di tengah-tengah umat, keberadaan pemimpin agama dengan demikian tidak seragam. Ada sebagian tokoh yang sangat dihormati karena memiliki kharisma, ada tokoh yang kurang memiliki otoritas dan legitimasi di kalangan umat. Tingkat kepatuhan para tokoh di kalangan umat merupakan tema tersendiri yang juga menarik untuk ditelaah lebih lanjut.

---

<sup>49</sup> Wawancara, tanggal 1 September 2015.

Relasi antartokoh atau pemimpin agama sangat berperan penting bagi upaya penciptaan harmoni antarumat. Kedekatan dan keakraban antar tokoh memberi dampak positif bagi kedekatan dan keakraban antar umat. Oleh karena itu pola relasi, komunikasi dan dialog antar tokoh penting untuk tetap terjaga. Kedekatan para tokoh lintas agama terkadang efektif membendung beragam isu negatif yang potensial mengganggu hubungan antar umat beragama.

Guna menjalin komunikasi dan dialog antarumat agama, pemerintah membentuk forum komunikasi umat beragama yang disingkat FKUB. Untuk kepentingan melihat secara lebih luas mengenai peran para pemimpin agama, maka menarik untuk ditelaah secara sekilas keberadaan forum ini. Hal ini mengingat masing-masing agama memiliki mengirim perwakilan yang biasanya diwakili oleh para tokoh agama masing-masing. Pembentukan FKUB berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Isi PBM ini antara lain mengamanatkan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. FKUB merupakan wadah pertemuan dan komunikasi umat beragama yang bertujuan untuk meningkatkan kerukunan dan harmoni antar umat beragama.

Secara umum tugas forum ini antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan kerukunan antar umat beragama. Untuk mengembangkan kerukunan tersebut pintu utama yang harus dilalui adalah melalui komunikasi.

- 2) Melakukan dialog internal dan eksternal umat beragama. Aktifitas ini menyangkut dialog teologis guna memperluas wawasan keberagamaan (*religious literacy*). Tidak hanya berhenti pada dialog, para pemimpin agama ini juga didorong mengembangkan aksi kerjasama sosial dan keagamaan.
- 3) Menampung keinginan, aspirasi, keluhan, kritik, usul, saran, gagasan dari umat dan pemerintah bagi peningkatan kualitas keberagamaan
- 4) Menyalurkan aspirasi, keluhan, kritik, usul, saran, gagasan tersebut bagi pengembangan dan peningkatan kualitas keberagamaan
- 5) Mensosialisasikan peraturan, perundang-undangan baik pusat maupun daerah yang berkaitan dengan upaya peningkatan kerukunan umat beragama
- 6) Melakukan pemberdayaan umat di bidang pendidikan, ekonomi, pertanian, politik, hukum, sosial guna penguatan semangat kerukunan
- 7) Khusus FKUB Kab/Kota, memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menerbitkan izin pendirian rumah ibadah.

Sebuah penelitian yang khusus meneliti peranan FKUB menyebutkan beberapa catatan, antara lain:

- 1) Di beberapa wilayah yang belum memiliki FKUB, kesadaran masyarakat tentang eksistensi dan fungsi FKUB bagi kerukunan nampaknya belum tumbuh secara baik.
- 2) Di beberapa daerah, FKUB yang sudah terbentuk belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang termuat dalam PBM, baik dalam hal

eksistensi, cakupan tugas, maupun keanggotaan FKUB. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh faktor kondisi lokal, atau mungkin kekurangpahaman terhadap PBM itu sendiri.

- 3) Dalam menangani beberapa kasus tertentu, FKUB seringkali menemukan kesulitan dalam menyelesaikannya karena ketiadaan acuan bersama, selain adanya beberapa jalan keluar yang cukup beragam dan bersifat *ijtihadi*.<sup>50</sup>

Tidak jauh berbeda dengan temuan di atas, keberadaan FKUB di Kota Mataram sangat penting bagi upaya merajut harmoni antarumat beragama. Kehadiran tokoh-tokoh agama yang tergabung dalam FKUB merupakan hal penting agar pola komunikasi antar tokoh dapat terbangun secara baik. Sehingga apabila muncul hal-hal negatif yang berpotensi mengganggu harmoni sosial dapat diketahui secara lebih cepat dan ditangani secara baik.

Catatan menarik berkaitan dengan forum komunikasi antar tokoh lintas agama seperti dalam FKUB, seorang pengurus Parisada menyatakan bahwa yang diperlukan adalah forum sejenis sampai ke tingkatan yang terkecil, yakni sampai ke tingkat desa. Selama ini komunikasi hanya berlangsung di tingkat elit saja, belum terjadi di tingkat bawah. “Idealnya komunikasi dan dialog harus mengakar ke tingkat bawah”, demikian kata I Gede Mandre. Kegiatan pertemuan antartokoh

---

<sup>50</sup> Liat. Nuhriison M. Nuh dan Akmal Salim Ruhana , “Peranan FKUB dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 di Prov. Jawa Timur “ dalam Kustini ed. *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2010), 4

tidak hanya berhenti di ruang-ruang seminar, atau dialog di hotel-hotel, tetapi harus menyentuh di level bawah.

Lebih lanjut I Gede Mandre menyatakan, “sebenarnya pengadaan pertemuan antaretnis oleh level elitnya itu seharusnya dilaksanakan di tingkat desa bukan di hotel-hotel, atau kantor saja. Artinya pertemuan antartokoh agama itu dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan yang berbeda-beda”.<sup>51</sup> Karena sejatinya persoalan riil relasi antar umat terdapat di komunitas atau lingkungan tempat tinggal.

Dalam relasi sosial antarumat, berbagai persoalan kerap muncul dan memerlukan ketrampilan khusus dalam mengelolanya. Ketegangan dan konflik tak jarang mewarnai relasi sosial antarumat beragama. Kemampuan menyikapi dan menangani konflik yang melibatkan umat beragama sangat diperlukan oleh tokoh atau pemimpin agama. Berkaitan dengan hal di atas, paparan berikut berisi tentang pandangan tokoh atau pemimpin lintas agama terhadap konflik.

## **E. Pandangan Tokoh Agama tentang Konflik**

Dalam sub bab ini dipaparkan secara lebih rinci pandangan pemimpin lintas agama mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan konflik, seperti pandangan mereka tentang definisi, ragam bentuk, penyebab, eskalasi, dan potensi konflik di Kota Mataram.

Pandangan para elit lintas agama sangat beragam. Secara umum, mereka memandang konflik sebagai sesuatu yang berkonotasi negatif. Sebagian besar

---

<sup>51</sup> Wawancara, tanggal 30 Agustus 2015

tokoh melihat konflik sebagai sesuatu yang bersifat destruktif alias merusak. Oleh karena itu, menurut mereka konflik sebisa mungkin harus ditiadakan, diredam atau setidaknya dihindari. Konflik sosial dianggap sebagai sesuatu yang mencederai harmoni dan mengganggu relasi antarkelompok warga.

Salah seorang anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB, Tuan Guru Haji Mukhtar, misalnya menyatakan bahwa konflik adalah sesuatu yang harus ditekan dan jangan lagi muncul. “Kita ini selalu berusaha agar Mataram ini menjadi kota yang aman, damai dan jauh dari konflik”. Pernyataan senada diungkapkan oleh Profesor Lukman Hakim. Anggota FKUB Provinsi NTB yang tinggal di Mataram ini menyatakan bahwa tokoh agama dan tokoh masyarakat harus berusaha keras agar masyarakat terhindar dari konflik. “Ya.. kalau bisa jangan ada konflik *lah*, biar kita ini aman”,<sup>52</sup> demikian ungkap Yahya Mugiono, tokoh Kristen, anggota FKUB Kota Mataram. “*Kan capek* konflik terus, kapan damainya. Hindari konflik, bangun kedamaian”, kata Pendeta Bob.<sup>53</sup>

Dari pernyataan sejumlah tokoh agama tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar konsepsi tentang konflik berbeda dengan definisi konflik dalam perspektif akademis. Dalam kajian akademik, konflik merupakan kenyataan hidup yang tidak terhindarkan dan kadang bersifat kreatif. Dinyatakan kreatif, mengingat sering kali dinamika masyarakat berlangsung dan terus berkembang justru akibat munculnya berbagai konflik. Munculnya konflik malah diperlukan sebagai upaya menjaga stabilitas sosial. Berbagai ketegangan antar kelompok

---

<sup>52</sup> Wawancara, tanggal 26 Agustus 2015.

<sup>53</sup> Wawancara, tanggal 25 Agustus 2015.

semakin kelihatan dan akan mengalami keseimbangan ke arah integrasi setelah berlangsung konflik.

Konflik terjadi ketika tujuan tidak sejalan atau karena kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya serta sudut pandang terhadap suatu permasalahan. Sebagaimana dinyatakan Ralf Dahrendorf bahwa konflik merupakan fenomena yang selalu hadir (*inherent omni-presence*) dalam suatu komunitas<sup>54</sup>.

Berkembangnya pengertian konflik sebagai sesuatu yang harus dihindari seperti di atas, memperlihatkan bahwa sebagian besar orang lebih berorientasi pada harmoni ketimbang disharmoni. Orientasi kepada harmoni semacam ini sebetulnya bukan hanya khas masyarakat Mataram Lombok. Di Jawa, sebagian besar orang juga lebih memilih kedamaian ketimbang konfrontasi dan ketegangan. Ketegangan sebisa mungkin dihindari. Orientasi terhadap kedamaian atau harmoni seperti ini pada kondisi tertentu memiliki dampak sosial yang positif. Masyarakat terbiasa untuk mengedepankan persatuan atau integrasi. Hanya saja, dampak negatifnya seringkali bila terjadi gesekan sosial, banyak pihak yang kurang bisa mengelaborasi persoalan secara tuntas. Dalam jangka panjang model orientasi kepada kedamaian ini akan mengarah pada konflik kekerasan, bila banyak persoalan menumpuk tak terkomunikasikan.

Sebagai tambahan, munculnya kesan negatif mengenai konsepsi konflik, terjadi karena sebagian besar orang memandang konflik sama dengan kekerasan (*violence*). Padahal, tidak semua konflik disertai kekerasan. Konflik dimaknai

---

<sup>54</sup> Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society* (Stanford: Stanford University Press, 1959), 241 – 248.

sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih baik dalam kapasitasnya sebagai individu maupun kelompok yang memiliki atau mereka menganggap memiliki tujuan yang bertentangan. Adapun kekerasan (*violence*) meliputi tindakan, kata-kata atau sikap, struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan fisik, psikis dan lingkungan.<sup>55</sup> Maka idealnya seorang individu atau kelompok bukan menghindari konflik, melainkan mengelola konflik tersebut sehingga tidak mengarah kepada tindak kekerasan yang bersifat destruktif.

Adapun mengenai penyebab konflik, sejumlah tokoh memberikan penilaian cukup menarik. Menurutnya penyebab munculnya konflik bervariasi. Konflik muncul karena alasan ekonomi, persoalan politik, dendam pribadi dan hanya sedikit (kalau tak boleh dikatakan tidak ada sama sekali) yang berkaitan langsung dengan persoalan keagamaan. Secara garis besar para tokoh menganggap konflik agama tidak berlangsung di Kota Mataram. Tetapi yang terjadi adalah konflik antarwarga yang kemudian diseret-seret ke ranah konflik agama atau etnis. I Gusti Lanang Media menyatakan,

“Agak sulit saya menjelaskan bentuk-bentuk konflik tersebut. Karena warna konflik itu sangat beragam, artinya pemicu konflik itu tidak ada karena ajaran agama tetapi konflik itu meluas karena solidaritas agama, suku dll. Sehingga dari awal tidak ada konflik agama tetapi biasanya seolah olah pada akhirnya karena agama. Sehingga beberapa waktu yang lalu sempat menyinggung bahwa ada peran media massa yang cenderung membesar-besarkan masalah itu sehingga bias pun terjadi”.<sup>56</sup>

Hal yang tak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Ir. Yahya Mugiono, tokoh Protestan Kota Mataram. Dalam sebuah wawancara, ia memaparkan,

---

<sup>55</sup> Sholihan, “Memahami Konflik” dalam M. Mukhsin Jamil (ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, (Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007), 6.

<sup>56</sup> Wawancara, tanggal 1 September 2015.



“...konflik yang pernah terjadi seolah-olah konflik agama. Padahal kalau kita telusuri lebih dalam yang muncul adalah kepentingan politik, dan kepentingan-kepentingan tertentu yang ada di dalamnya. Jadi bukan konflik agama”.<sup>57</sup>

Tingkat atau skala konflik juga sangat fluktuatif. Ada yang bersekala kecil seperti konflik antar pribadi hingga konflik yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Sebagian besar konflik yang terjadi di kota ini adalah konflik yang bersifat pribadi. Yahya Mugiono, menyatakan:

“Konflik di masyarakat sebenarnya lebih banyak konflik yang sarat tendensi kepentingan pribadi dan politik yang ditarik pada hal yang berhubungan dengan agama. Sehingga konflik yang pernah terjadi seolah-olah ada yang memanfaatkan untuk kepentingan terciptanya konflik agama. Sehingga semakin kita kaji lebih dalam yang muncul adalah kepentingan politik, dan kepentingan-kepentingan tertentu yang ada di dalamnya”.<sup>58</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh I Gusti Lanang Media, tokoh agama Hindu bahwa sebagian besar konflik bermula dari persoalan persona antar warga. “Saya melihatnya kalau masalah konflik pribadi-pribadi dimana-mana bias terjadi dan bahkan dengan siapa saja bisa terjadi di pasar atau di mall, tapi persoalannya adalah jangan sampai konflik yang terjadi itu diperluas dengan solidaritas primordial. Jika polanya masih sama maka akan terjadi lagi dan berulang mungkin”, demikian ungkap I Gusti Lanang.<sup>59</sup>

Dari persoalan yang bersifat personal antar warga selanjutnya meluas menjadi konflik kekerasan yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Agus Bob, dari Katolik menyatakan, “Kalau menurut saya penyebabnya adalah ikut-ikutan

---

<sup>57</sup> Wawancara, tanggal 26 Agustus 2015.

<sup>58</sup> Wawancara, tanggal 26 Agustus 2015.

<sup>59</sup> Wawancara, tanggal 1 September 2015.

atau solidaritas antarwarga, antaragama meski mereka tidak memahami persoalan yang sebenarnya”.<sup>60</sup>

Persoalan konflik yang melibatkan massa dalam jumlah besar di Kota Mataram memang sebelumnya bermula dari persoalan konflik antar pribadi. Kasus konflik antara warga Nyangget (mayoritas Muslim) dan Saksari (Mayoritas Hindu) beberapa tahun lalu juga bermula dari perkelahian antar remaja. Hal yang sama juga terjadi antara warga Karang Mas-mas (mayoritas Muslim) dengan warga Tohpati (mayoritas Hindu) di penghujung tahun 2012 dan awal tahun 2013 juga akibat saling olok antara sekelompok anak muda. Demikian halnya antara warga Karang Tapen (mayoritas Muslim) dengan warga dari kampung Karang Lelede dan Karang Jasi (kedua lingkungan mayoritas warganya beragama Hindu).

Penjelasan mengenai konflik yang pernah terjadi kota Mataram seperti tersaji berikut ini.

#### *Kasus Karang Taliwang dengan Sindu dan Tohpati*

Konflik komunal antara warga Muslim Karang Taliwang dengan warga Hindu dari kampung Tohpati dan Sindu kecamatan Cakranegara berlangsung beberapa kali. Kasus kerusuhan pernah terjadi di antaranya pada tahun-tahun 1980-an, dan tahun 2000. Pada umumnya konflik bermula dari perkelahian antar pemuda, kemudian melibatkan warga dalam jumlah besar dari kedua kampung.

Pada tahun 1980-an sempat terjadi *mesiat* (perang) yang melibatkan komunitas Hindu dan Muslim. Salah satu penyebabnya adalah persoalan pembangunan tempat ibadah yang saling berdekatan. Pembangunan masjid yang

---

<sup>60</sup> Wawancara, tanggal 25 Agustus 2015.

berdekatan dengan pura, sementara pura telah lama berdiri.<sup>61</sup> Nuansa keagamaan dalam kerusuhan antara warga Muslim dari Karang Taliwang dengan komunitas Hindu dari kampung Tohpati dan Sindu juga kembali menguat. Konflik yang terjadi di tahun 2000 misalnya dipicu oleh ketersinggungan warga Bali di Tohpati yang sedang merayakan Nyepi yang merasa terganggu oleh suara pembacaan *sholawat* dalam kegiatan *selakaran*<sup>62</sup> yang diselenggarakan warga Muslim Karang Taliwang. Tradisi pembacaan *selakaran* ini dimaksudkan untuk menyambut kedatangan warga Karang Taliwang yang baru pulang menunaikan ibadah haji.<sup>63</sup> Untungnya, konflik dapat segera dikendalikan sehingga tidak meluas menjadi kerusuhan terbuka.

Kasus konflik antara warga Hindu dan Muslim kembali muncul di penghujung tahun 2012. Konflik melibatkan dua kampung yang berada di dekat Karang Taliwang, yakni antara warga Tohpati yang mayoritas Hindu dengan warga Karang Mas-mas yang mayoritas Muslim. Konflik komunal ini dipicu oleh perkelahian antara pemuda dari kedua kampung yang saling berdekatan ini pada Rabu Malam 19 Desember 2012.<sup>64</sup>

Akibat perkelahian itu, Sulaiman, pemuda Karang mas-mas tewas terkena sabetan pedang oleh pemuda dari lingkungan Tohpati. Korban yang

---

<sup>61</sup> Israil dkk., *Dinamika Pluralisme Agama di Nusa Tenggara Barat*, *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 1, No. 1, Desember 2004: 1-16

<sup>62</sup> *Selakaran* adalah kegiatan membaca *salawat* atau syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad seperti pembacaan *barzanji*. Kegiatan ini sering dilakukan masyarakat Islam Lombok pada momen-momen tertentu seperti saat acara *kutisan* (potong rambut untuk bayi), khitanan dan mengantar atau menyambut jamaah haji. Di sebagian lokasi, seperti di wilayah Karang Baru Mataram, tradisi *selakaran* aktif dilakukan secara reguler, sekali seminggu.

<sup>63</sup> Lihat Israil dkk., *Dinamika Pluralisme Agama*, 11; lihat juga “Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama Di Nusa Tenggara Barat” Penelitian oleh Tim Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang dan Diklat, Tahun 2006.

<sup>64</sup> Dikutip dari “Bentrok antar Pemuda, Satu Tewas”, Berita Harian Pagi Lombok Post, 20 Desember 2012.

masih duduk di bangku kelas III salah satu SMU di kota Mataram ini sempat dilarikan ke rumah sakit tetapi nyawanya tak tertolong. Buntut dari perkelahian ini, Kamis malam, 20 Desember 2012 konflik kembali pecah. “Satu rumah warga dibakar, 3 anggota terkena lemparan batu”, kata Kapolresta Mataram, AKBP Kurnianto Purwoko.<sup>65</sup>

### ***Kasus Karang Tapen dengan Karang Jasi dan Karang Lelede***

Peristiwa kerusuhan sosial tahun 2001 sebetulnya bermula dari kasus serempetan sepeda motor yang terjadi di luar wilayah Karang Tapen dan Karang Jasi. Pemicu kerusuhan terjadi di kampung Sekarbela, 2 km arah utara Karang Tapen. Bermula dari serempetan pengendara sepeda motor antara warga Muslim Sekarbela dengan pemuda dari kampung Karang Lelede. Keduanya terlibat cekcok mulut dan perkelahian. Setelah merasa terdesak warga Sekarbela tadi meminta bantuan kepada warga Karang Tapen. Selanjutnya rumor cepat berkembang bahwa ada orang Islam yang diserang orang-orang Hindu. Sontak saja dukungan dan solidaritas warga Muslim di Karang Tapen muncul.

Pasca insiden itu, para pemuda Karang Tapen mulai bergerombol di jalan raya tepatnya Jalan Raya Palapa yang memisahkan antara pemukiman Karang Jasi dan Karang Tapen. Pada saat itu, seorang pemuda dari Gerung Lombok Barat yang tinggal di Karang Jasi datang menghampiri kerumunan pemuda Karang Tapen. Tanpa mengetahui persoalan genting yang sedang terjadi, ia bermaksud bertanya kepada kerumunan pemuda tersebut. Tanpa disangka salah seorang pemuda menghunus senjata tajam dan menusukkannya pada warga Bali tadi.

---

<sup>65</sup> Harian Pagi Lombok Post, 22 Desember 2012.

Kontan saja, warga Gerung terluka dan lari balik ke Karang Jasi. Korban selanjutnya segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Mataram yang berada 2,5 km dari lokasi kejadian.

Mendengar kejadian ini, keluarga korban marah dan datang beramai-ramai ke Karang Jasi di mana pemuda tersebut selama ini tinggal. Mereka sengaja datang dari wilayah Gerung Lombok Barat untuk bersimpati dan bermaksud mencari pelaku penusukan. Selagi mereka berkumpul di Karang Jasi, tiba-tiba seseorang melempar batu ke arah pemukiman Muslim Karang Tapen. Rumor segera menyebar di Karang Tapen bahwa warga Karang Jasi dan Karang Lelede telah bersatu hendak menyerang warga Karang Tapen.

Kondisi semakin mencekam tatkala terdengar "*kul-kul bulus*" (sejenis kentungan) terdengar bertalu-talu di kampung Karang Jasi dan Karang Lede . Bagi masyarakat Bali tanda ini sudah jelas maknanya. Bunyi *kul-kul bulus* merupakan tanda peringatan akan adanya bahaya yang bakal terjadi.<sup>66</sup> Warga dari kedua kampung segera berkumpul dan bersiap-siap untuk segala keadaan yang tak terduga. Mereka mulai saling berkomunikasi dan siap-siap jika suatu saat warga Karang Tapen menyerang. Para pemuda bergerombol lengkap dengan senjata tajam, senapan angin dan batu seolah mereka siap berlaga di medan pertempuran.

Sebaliknya suasana di Lingkungan Karang Tapen juga tidak kalah gentingnya. Teriakan takbir *Allahu Akbar* melalui pengeras suara masjid menggema di seluruh penjuru kampung. Memperingatkan kepada semua warga bahwa pertempuran akan segera mulai. Warga Karang Tapen terutama pemuda

---

<sup>66</sup> M.Natsir, dkk., "Pemetaan Kerukunan Hidup Beragama di Lombok" *Jurnal Penelitian Keislaman*, IAIN Mataram, Vol. 2, No. 1, (2005):1-23.

bersiap siaga dengan senjata tajam seperti tombak, pedang, parang dan batu. Akhirnya konflik kekerasan pun tak dapat dihindari. Kedua kelompok massa mulai saling melempar batu bahkan sebagian bom molotov. Banyak korban luka terkena lemparan batu dan terkena tusukan benda tajam. Rumah-rumah di pinggir jalan baik milik warga Muslim Karang Tapen maupun milik warga Hindu Karang Jasi dan Karang Lede mengalami kerusakan parah terutama di bagian atap rumah.

Pada saat kerusuhan berlangsung identitas dan simbol keagamaan mulai menguat menggantikan identitas etnik. Pada kondisi normal aman, orang Sasak biasa menyebut warga Hindu Bali sebagai warga Bali, namun pada saat konflik berlangsung terkadang penyebutan orang Hindu semakin sering. Pemukulan *kul-kul bulus* dibalas dengan teriakan *Allohu Akbar* di menara masjid merupakan salah satu fenomena yang sering muncul ketika ketegangan mulai muncul dan konflik menyembul ke permukaan. Keadaan seperti ini semakin menguat dan menunjukkan batas etnisitas dan religiusitas secara jelas. Terjadi pengelompokan berdasar identitas dan simbol keagamaan. Seseorang yang terlibat kerusuhan pada saat itu, menceritakan kronologi kejadian kepada penulis;

“Pas ada keributan itu lewatlah rombongan warga Bali yang saat itu akan merayakan hari raya Kuningan lengkap dengan pakaian *dodot*-nya lewat dari timur (dari arah jalan Ismail Marzuki). Memang biasa pak, kalau mereka mau merayakan hari besar agama biasanya lewat jalan ini menuju pura yang ada di samping Mall. Melihat keributan mereka serentak berhenti. Saat itu mereka *sangat* banyak dan kompak (penulis: identitas keagamaan sangat mencolok sangat mudah dibedakan mana Islam, mana Hindu karena mereka sudah pakai pakaian Hindu). Kami berhadapan-hadapan, maka terjadilah perkelahian massal dan saling lempar. Malam harinya berlanjut. Saat itu kami menang *pak*, pihak mereka banyak jatuh korban. Tapi hari keduanya kami kalah. Rupanya mereka mengundang bantuan dari daerah lain...”<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Suprpto, *Semerbak Dupa di Pulau Scribu Masjid...*,

Konflik kerusuhan baru mereda setelah pihak Polresta Mataram mengerahkan polisi menuju lokasi kejadian. Karena konflik terus membesar, kepolisian dibantu pasukan TNI dari asrama Gebang yang lokasinya tak jauh dari tempat kerusuhan. Setelah aparat keamanan berhasil menghentikan aksi saling serang dan saling lempar, keadaan *chaos* mulai dapat dihentikan dan suasana kembali tenang.

Setelah konflik kekerasan mulai reda dan suasana kampung mulai kondusif, selanjutnya aparat keamanan bersama pihak pemerintah kota melakukan mediasi antara dua kelompok. Langkah yang dilakukan kala itu adalah mempertemukan tokoh-tokoh dari kedua kelompok setelah sebelumnya mengirim korban luka ke Rumah Sakit Umum kota Mataram. Para *Tuan Guru* dan *Pedanda* mewakili kedua kelompok dikumpulkan untuk menyelesaikan persoalan. Polisi mengamankan orang-orang yang dianggap pemicu kerusuhan. Keadaan berangsur pulih, keamanan kampung mulai tercipta dan warga mulai bisa kembali beraktivitas termasuk pergi ke pasar Karang Lelede, pasar di pinggir perempatan yang setiap hari menjadi tempat bertemu warga dari ketiga lingkungan. Guna mendukung peningkatan keamanan, pos polisi pun dibangun tepat di depan pasar Karang Lelede.

Konflik dan ketegangan - sama seperti yang dikatakan Lewis Coserupanya telah membangkitkan solidaritas internal kelompok. Masing-masing kelompok berusaha untuk membekali diri dan mengintensifkan hubungan di kalangan internal mereka. Kebanggaan pada kelompok pada saat tertentu

dimunculkan dengan membangkitkan superioritas kelompok atas yang lain. Salah seorang informan, Sahar, lebih lanjut menuturkan perasaan jengkelnya ketika suatu ketika dalam kerusuhan, orang-orang Bali lewat pengeras suara (*megaphon*) berteriak menantang "... kami datang di Lombok karena menang perang. Jadi jangan macam-macam".<sup>68</sup> Terlihat bahwa memori masa lalu berupa kebencian kolektif dan permusuhan antar orang Bali dan Lombok sesekali hadir dalam konflik dan ketegangan masa kini.

Mencermati kasus-kasus kerusuhan yang melibatkan komunitas Muslim Karang Tapen dan komunitas Hindu dari Karang Jasi dan Karang Ledé, orang boleh menyatakan bahwa ini bukan merupakan konflik agama. Tetapi melihat maraknya simbol-simbol agama yang mengemuka saat konflik berlangsung, sulit untuk tidak mengaitkan persoalan kerusuhan ini dengan konflik bernuansa etnis dan agama. Paparan berikut ini semakin menjelaskan tentang kuatnya faktor agama yang kerap hadir dalam konflik komunal.

Selain faktor perkelahian antar anak muda, kerusuhan di Mataram juga akibat hal-hal yang berkaitan dengan agama. Hal ini misalnya terlihat dalam kasus kerusuhan 171 dan perusakan dan penolakan tempat peribadatan.

Kasus "171", yakni sebuah kerusuhan massal yang terjadi pada tanggal 1 Januari tahun 2000. Di beberapa tempat di Kota Mataram terjadi pembakaran gereja. Beberapa toko milik etnis tertentu juga tak luput dari amuk massa. Banyak pegawai negeri dan warga pendatang yang eksodus dari kota Mataram. Penyebab amuk massa ini disinyalir merupakan respons terhadap konflik keagamaan di

---

<sup>68</sup> Suprpto, *Sembak Dupa di Pulau Sribu Masjid...*,



Maluku dan Ambon setelah massa mengikuti tablig akbar di lapangan umum kota Mataram. Kekerasan yang menimpa Muslim di Ambon Maluku gampang sekali membangkitkan solidaritas umat Islam di pulau seribu masjid ini.

### ***Kasus Perusakan dan Penolakan Pura***

Kasus lain yang sangat mengganggu hubungan antara Hindu dan Muslim adalah kasus perusakan dan pembakaran pura. Peristiwa ini terjadi di awal tahun 2008 tepatnya hari Selasa, 15 Januari di malam hari. Ratusan massa menyerbu, merusak dan membakar bangunan di lingkungan Pura Sangkareang di Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.<sup>69</sup>

Penolakan keberadaan pura juga terjadi di wilayah Mataram. Di wilayah kecamatan Sekarbela Mataram, warga Gubuk Mamben beberapa bulan yang lalu melakukan protes pada pengurus *pura dalem* yang ada di lingkungan Saren. Untungnya, protes yang dilakukan warga ini tidak sampai menimbulkan konflik terbuka. Lokasi lingkungan Gubuk Mamben dan lingkungan Saren sebenarnya sangat berdekatan. Kedua lingkungan ini hanya dipisahkan oleh jalan raya, yakni Jl. Sultan Kahrudin. Menurut warga Gubuk Mamben, mereka melakukan protes karena adanya alih fungsi *seme* (kuburan orang Hindu) menjadi pura. “Dulu lokasi ini hanya menjadi *seme*. Bukan tempat sembahyang. Tetapi sekarang

---

<sup>69</sup> Pura ini sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu (diperkirakan dibangun sejak tahun 1680-an) dan telah beberapa kali mengalami pemugaran. Pada tahun 2006 umat Hindu di sekitar pura kembali melakukan pemugaran dan rencananya akan dilangsungkan *Piodalan/Pujawali* pada 22 Januari 2008, pada bulan Purnama. Namun pemugaran pura yang sudah hampir selesai itu hancur berantakan akibat kejadian 15 Januari 2008 itu. Kronologi kejadian seperti yang dilaporkan secara resmi oleh pengurus PHDI Provinsi NTB yang ditandatangani oleh Ketua dr. IK Gerudug, M.P.H, dan Sekretaris Dr. Ir. KG Wiryawan, M.Ag. Pimpinan KMHDI Pusat melalui siaran pers mengecam keras perusakan ini dan menuntut pemerintah bertindak tegas terhadap para perusuh serta memberi jaminan keamanan bagi penganut agama. Dikutip dari SIARAN PERS Pernyataan Sikap tentang Perusakan Pura Sangkareang di Lombok tertanggal 17 Januari 2008.

banyak orang Hindu dari kampung lain yang sering datang ke sini untuk sembahyang” Demikian kata Tahmid Syafii kepala Lingkungan Gubuk Mamben.<sup>70</sup>

Aksi penolakan warga Gubuk Mamben mengemuka secara jelas ketika peringatan 1 Muharam. Pada saat itu, warga Gubuk Mamben bersama warga Muslim selingkungan Sekarbela Timur (Gubuk Mamben dan Sekarbela Bongkot) membuat sebuah tuntutan yang dituangkan dalam deklarasi 1 Muharam 1433 H. Dalam deklarasi yang ditandatangani 75 orang warga dan tokoh masyarakat ini, warga menyampaikan lima butir kesepakatan yang intinya berisi; *Pertama*, anjuran memperkokoh *ukhuwah islamiyah*, *Kedua*, dukungan terhadap program pemerintah terutama yang berkaitan dengan program kerukunan antar umat beragama. *Ketiga*, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, warga menolak keberadaan rumah ibadah umat lain di tengah pemukiman komunitas Muslim. *Keempat*, meminta Pemkot Mataram untuk melakukan penertiban terhadap setiap pelanggaran pembangunan tempat ibadah yang tidak sesuai dengan perundang-undangan. *Kelima*, meminta Pemkot Mataram untuk mengembalikan *seme* kepada fungsinya semula sebagai tempat pemakaman umat Hindu dan bukan sebagai pura.<sup>71</sup>

Hingga penelitian ini berlangsung, persoalan *seme* di atas masih belum memperoleh penyelesaian secara tuntas. Berhari-hari kondisi di kawasan

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Tahmid Syafii kepala Lingkungan Gubuk Mamben tanggal 29 Maret 2012.

<sup>71</sup> Dikutip dari selebaran deklarasi 1 Muharram 1433 H yang dibuat oleh Masyarakat Sekarbela Timur.

Sekarbela masih agak tegang. Sejumlah pemuda Gubuk Mamben ingin melakukan protes beramai-ramai ke pengurus *seme*. Langkah ini dicegah oleh kepala lingkungan. Mereka melakukan protes ke kelurahan dan meminta perangkat desa melakukan mediasi. Perwakilan dari komunitas Hindu yang diundang tidak datang. Menurut pengakuan salah seorang warga Hindu dari Lingkungan Saren, mereka sengaja tidak datang karena takut diamuk massa. “Kami memang dapat undangan dari kelurahan untuk membicarakan protes warga, tetapi kami tidak berani datang, kalau kondisinya memanas begini” demikian kata I Wayan Wiratha.<sup>72</sup>

I Wayan Wiratha selaku pengurus banjar juga mempertanyakan persoalan protes yang dilancarkan warga terkait keberadaan pura. “Saya sendiri heran, pura ini keberadaannya sudah lama. Bahkan menurut catatan kami, pura ini dibangun sejak tahun 1802. Tetapi kenapa baru sekarang dipersoalkan. Apalagi yang digunakan dasar adalah peraturan yang terbit tahun belakangan”, ungkap Wayan. Apa yang disampaikan oleh Wayan sama seperti yang dikeluhkan oleh Widy, sekretaris PHDI Propinsi NTB. Dia menilai bahwa di sejumlah tempat, keberadaan pura yang telah berumur puluhan bahkan ratusan tahun yang semula tidak ada permasalahan, kini justru dipersoalkan warga.

Ketegangan antara warga Gubuk Mamben dan Singgahan yang Muslim dengan warga Hindu Saren di wilayah Sekarbela sebetulnya telah lama terjadi. Sejak beberapa tahun terakhir warga Muslim di sekitar Pura Saren keberatan jika area pura tersebut dibangun tembok. Apalagi pembangunan tembok keliling tanpa

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan I Wayan Wiratha tanggal 28 Maret 2012.

melibatkan warga Gubuk Mamben. Warga Gubuk Mamben keberatan karena merasa memiliki sebagian tanah yang sekarang ditempati pura ini. “Pernah dulu, mereka menembok keliling *seme*. Terus malamnya kita robohkan. Nah setelah beberapa bulan berikutnya banyak polisi dan tentara yang ikut jaga di lokasi itu. *Nah*, kita tidak berani. Zaman dulu *kan* kita takut sama aparat”, ’ demikian penjelasan pak Tahmid. Setelah keadaan berubah, sekarang banyak warga mempersoalkan kembali. Bagi warga Gubuk Mamben, sebagian tanah yang digunakan untuk pura adalah milik warga Mamben.

Penjelasan lain diberikan oleh Hatta, seorang polisi dari intelkam Polda NTB. Menurutnya, protes warga terjadi setelah anak-anak yang main bola di depan halaman pura sering dilarang oleh pengurus pura. Demikian juga ketika banyak kuda-kuda *cidomo* (sejenis delman) milik warga Gubuk Mamben yang biasa merumput di halaman pura juga dilarang. Inilah yang menimbulkan keberatan warga.<sup>73</sup>

Terkait dengan hal ini, Tahmid, salah seorang pimpinan Gubuk Mamben menyatakan bahwa warga Gubuk Mamben sering dibuat tidak senang dengan teguran yang dilakukan pihak pura ketika anak-anak sedang main bola di luar kompleks pura. Menurutnya, anak-anak yang main bola masih di luar pura bukan di dalam pura. “Dulu kami biasa dimintai tolong orang Lingkungan Saren untuk menebang pohon pisang, mengambil memanen mangga. Tapi sekarang kita cari rumput di sekitar mereka saja dimarahi”.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Hatta, seorang anggota polisi di Polda NTB tanggal 24 Maret 2012.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Tahmid Syafii tanggal 29 Maret 2012

Jika dicermati, kasus konflik dan ketegangan yang terjadi antara warga Gubuk Mamben dan warga lingkungan Saren, sebetulnya memiliki akar yang cukup panjang. Menurut hemat penulis, persoalan ini sangat terkait dengan dua hal; *Pertama*, terputusnya komunikasi yang selama ini pernah terjalin antara warga Gubuk Mamben dengan warga Saren. Warga kedua lingkungan dalam beberapa tahun terakhir tak lagi berkomunikasi secara akrab. Meskipun mereka sering bertemu di pasar Pagesangan ( $\pm$ 1km dari Gubug Mamben), tetapi model komunikasi yang dikembangkan sebatas formalitas. Bahkan, sejumlah orang mengeluhkan, terutama yang Hindu, bahwa akhir-akhir ini ada nasihat dari orang per-orang untuk tidak melakukan transaksi jual beli dengan warga Hindu.

*Kedua*, berkurangnya *public space* yang dapat menjadi arena pertemuan kedua komunitas yang berbeda etnis dan agama ini. Dari penelusuran penulis, dahulu anak-anak dapat dengan leluasa bermain bola, atau mengadakan perlombaan di areal sekitar pura. Pada bulan *maulid* misalnya, warga Muslim biasa mengadakan *jurakan* (lomba panjat pinang) di lokasi ini. Demikian juga kuda-kuda penarik *cidomo* juga dapat merumput di lokasi sekitar pura. Ketika para pengurus pura melakukan penembokan keliling, dengan alasan keamanan dan kebersihan lingkungan pura, maka ruang-ruang publik ini menjadi hilang. Apalagi proses pembangunan tembok keliling tidak dikomunikasikan kepada warga Gubuk Mamben yang mengklaim bahwa fasilitas itu merupakan fasilitas publik. Sementara bagi warga Saren, keberadaan pura telah lama dan menurut pengakuan pengurus pura, mereka telah mengantongi sertifikat kepemilikan pura sebagai milik banjar. Sayangnya, pemerintah kota Mataram juga kurang cepat

dalam merespon kondisi ini. Idealnya pemkot juga menyediakan lapangan atau tempat terbuka sebagai *public space*. Keberadaan *public space* dalam pengertian spasial semacam ini penting dan penulis kira hendaknya menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun tata ruang kota. Penataan kota, idealnya, tidak hanya untuk mengembangkan pusat-pusat bisnis semata, melainkan juga harus diimbangi dengan penyediaan ruang terbuka yang bisa diakses semua warga.

Terkait dengan konflik kerusuhan yang muncul, sejumlah analisa banyak diberikan, misalnya mengaitkan sejumlah kerusuhan yang terjadi dengan kegiatan politik daerah berupa pemilihan walikota. Biasanya analisa diberikan bahwa konflik muncul akibat ulah provokator.<sup>75</sup> Sebuah penjelasan mencari kambing hitam akibat ketidakjelasan aktor yang bertanggungjawab terhadap munculnya konflik. Tetapi, penjelasan seperti ini tampak tidak cukup adekuat menjelaskan tentang *roots of conflict* secara utuh. Atau penjelasan yang mengaitkan bahwa konflik muncul akibat perebutan akses ekonomi. Hanya saja, lagi-lagi penjelasan seperti ini juga gagal memerinci pada aspek apa saja konflik muncul. Bukankah sebenarnya perebutan akses ekonomi juga merupakan fenomena yang lazim mengiringi dinamika interaksi manusia.

Selain kerusuhan sosial yang melibatkan kelompok etnis dan agama yang berbeda, konflik sosial juga terjadi di internal umat Islam, seperti bentrok antar kampung antara warga desa Karang Genteng dan Patemon, Karang Genteng dengan Pagutan Presak. Tidak dapat diketahui secara pasti penyebabnya karena

---

<sup>75</sup> Untuk analisa seperti ini lihat salah satunya pada Mustain dan Mukhlis, *Hubungan Hindu Muslim di Kota Mataram (Kajian Potensi Integrasi dan Konflik dalam Hubungan antar Agama)* Laporan Penelitian Lemlit STAIN (Mataram, 2003).

konflik terus berulang. Konflik telah mulai sejak tahun 1988. Korban yang jatuh di salah satu pihak menyebabkan dendam yang sulit diurai. Sebagian pihak menyatakan perebutan lokasi makam akibat pemekaran wilayah perkotaan tahun 1978. Dalam beberapa tahun terakhir kondisi di wilayah ini relatif aman. Lama tak terdengar keributan hyang melibatkan massa dalam jumlah besar seperti tahun-tahun sebelumnya. Di pertigaan jalan yang ada di sekitar kampung-kampung ini telah didirikan pos polisi. Pos polisi ini dimaksudkan untuk menjaga agar ketenangan dan kedamaian warga dapat terjamin.

#### **F. Pandangan Tokoh Agama mengenai Penanganan Konflik.**

Pola-pola penanganan konflik yang pernah terjadi di Mataram juga menjadi sorotan para tokoh agama. Menurut para tokoh agama dan masyarakat pemerintah kurang menyiapkan langkah penanganan konflik secara sistematis. Penanganan sistematis yang dimaksud tidak hanya berlangsung saat konflik terjadi tetapi yang lebih penting adalah pascakonflik. Termasuk yang sangat krusial adalah pola-pola pencegahan atau langkah-langkah preventif agar konflik tidak pecah menjadi kekerasan yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Untuk mencegah terjadinya konflik kekerasan maka pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi hal yang penting.

Pelibatan tokoh agama biasanya hanya pada saat konflik berlangsung. Jarang sekali tokoh agama dilibatkan dalam proses-proses yang sifatnya preventif atau pencegahan. Yahya Mugiono menjelaskan, “Pelibatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pada saat konflik terjadi saja. Kalau upaya preventif *sih...*

kelihatannya tidak ada dan kalau ada itu bentuknya sebagai proyek saja dalam pengumpulan (tokoh agama: penulis) itu”<sup>76</sup>

Pernyataan senada juga disampaikan I Gusti Lanang Media. Menurutnya tokoh agama ibarat pemadam kebakaran. Anggota FKUB dari perwakilan komunitas Hindu ini menyatakan, “kita sebagai tokoh khususnya FKUB cenderung seperti pemadam kebakaran yang hanya melakukan pertemuan dan *silaturrahmi* dalam membangun kerukunan pada saat atau setelah konflik itu terjadi dan tidak terlalu banyak melakukan upaya preventif terjadinya konflik”<sup>77</sup>

Seperti lazim terjadi, manakala berlangsung kerusuhan antarwarga, pemerintah mengundang tokoh-tokoh agama dalam satu pertemuan. Tempat pertemuan biasanya diadakan di kantor desa, kantor kecamatan atau tempat-tempat yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam musyawarah tersebut, masing-masing perwakilan kelompok diundang untuk mendengar duduk permasalahannya. Di situ tokoh agama diminta memberi saran. Sebagian tokoh menjadi saksi bagi penandatanganan kesepakatan damai antar kelompok. Usai pertemuan, tidak ada program kegiatan lanjutan.

Menurut para tokoh agama ini, mereka merupakan sosok yang masih didengar oleh masyarakat. Sehingga beberapa saran dari tokoh agama bisa diikuti oleh umat. Dalam konteks ini, Bob, pendeta Kristen menyatakan, “Dalam proses penyelesaian konflik biasanya semua tokoh terlibat dalam penyelesaiannya. Karena dalam penyelesaian konflik tersebut tokoh agama memiliki peran strategis dan kuat dalam penyelesaian konflik itu”.

---

<sup>76</sup> Wawancara, tanggal 26 Agustus 2015.

<sup>77</sup> Wawancara, tanggal 1 September 2015.



Masih berkaitan dengan penanganan konflik yang dilakukan pemerintah, Yahya menyatakan, “Kelihatannya tidak ada upaya berkesinambungan yang dilakukan dalam upaya menyelesaikan konflik. Sehingga tokoh agama dan masyarakat secara individu lah yang membangun secara kesadaran silaturrahi. Tidak ada secara kelembagaan dan struktural kelembagaan dan keagamaan”.<sup>78</sup>

Pernyataan yang tak jauh berbeda juga disampaikan Widi, tokoh agama Hindu Kota Mataram. Menurutnya, bila terjadi konflik antarwarga tokoh agama sering diundang untuk melakukan mediasi. “Tapi setelah konflik mereda belum atau tidak ada program kelanjutannya. Padahal ini kan penting untuk menjaga masyarakat tetap kondusif”, demikian paparnya.

Tokoh agama juga menilai bahwa penanganan yang dilakukan pemerintah masih bersifat parsial atau belum bersifat menyeluruh. Penanganan konflik belum mengangkat penyebab utama terjadinya konflik. I Gusti Lanang menyatakan:

“Peran pemerintah dalam proses penanganan itu sebenarnya begini, pertama, bagaimana proses penanganan konflik saat ini masih menciptakan rasa tidak nyaman bagi masyarakat minoritas, sebenarnya hal-hak seperti itu saya lihat penanganannya masih parsial sekali. Sebagai contoh di Tohpati. Menurut saya cara ini seharusnya tidak dilakukan karena sebaiknya masyarakat dibiarkan membaur seperti biasa. Meski kadang pola penanganan yang sudah dilakukan saya rasa sudah cukup berhasil namun menurut saya pola penanganan yang dilakukan itu apapun bentuknya jangan sampai menimbulkan gap. Jika tidak ingin terulang kembali”.<sup>79</sup>

Dari paparan ini, dapat dinyatakan bahwa program penanganan konflik yang dilakukan pemerintah masih belum maksimal. Program penanganan konflik

---

<sup>78</sup> Wawancara, tanggal 26 Agustus 2015.

<sup>79</sup> Wawancara, tanggal 1 September 2015.

belum dirancang secara terprogram dan berkelanjutan. Belum adanya program penanganan konflik yang terprogram dan berkelanjutan juga menjadi catatan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mawardi, direktur salah satu LSM di Mataram, menyatakan,

“Kalau penanganan pemerintah itu hanya sigap saja, tetapi kesigapan itu tidak menghentikan konflik, cuma meredam saja dan atau meleraikan saja. Sebagai bukti, begitu ada konflik aparat *kan* langsung turun dan berjaga-jaga saja atau mungkin hanya mendamaikan saja. Itu *kan* membuktikan bahwa mereka hanya menjaga supaya tidak terjadi bentrokan susulan saja. Tetapi konflik itu tidak diselesaikan setuntas-tuntasnya”.

Menarik untuk dicatat, bahwa kinerja kepolisian menjadi catatan tersendiri terutama bagi kalangan minoritas. Polisi menurut kelompok minoritas ini masih sering berpihak kepada mayoritas. Proses-proses hukum yang melibatkan anggota kelompok mayoritas sering terhenti. Hal ini, menurut para tokoh agama, menjadi preseden buruk penanganan pelanggaran hukum. Akibatnya, para pelaku tidak memiliki jera dan di kemudian hari mereka akan mengulang tindak kriminal berikutnya.

Kritikan tentang kinerja aparat keamanan juga disampaikan beberapa tokoh. Menurut salah seorang tokoh Hindu, aparat sering gamang menangkap dan selanjutnya memproses secara hukum pelaku kriminalitas bila pelakunya berasal dari kelompok mayoritas. Kegamangan semacam inilah yang seringkali menimbulkan rasa tidak puas di kalangan minoritas. Lebih lanjut I Gusti menyatakan:

“Kalau kita berpikir bahwa polisi tidak akan berani menangkap jika pelakunya adalah mayoritas. Sehingga jika kita berpikir tentang berulang-ulang itu tentunya jika kita asumsikan bahwa ketidak tuntasannya itu sebagai sebuah bentuk ketidak mampuan atau ketidak beranian aparat menangkap

dan menyelesaikan secara tuntas dengan hukum. Pemerintah seolah-olah melakukan pembiaran tanpa penanganan. *Ya* tentunya pelaku akan berpikir untuk melakukan perbuatannya kembali karena tidak pernah ditangkap dan diproses secara hukum. Jadi pemerintah, aparat dan polisi memiliki peran yang cukup besar atas keberulangan itu”.<sup>80</sup>

Faktor penegakan hukum merupakan hal krusial dalam menciptakan ketenangan dan keharmonisan di masyarakat. Pelaku tindak kerusuhan hendaknya segera diproses, sehingga sebuah kasus tidak terlambat untuk dilokalisir. Keterlambatan penanganan kasus kerap berakibat pada ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Sebagai gantinya warga akan melakukan pencarian (*sweeping*) terhadap pelaku kriminal. Di sinilah biasanya awal kerusuhan massal berlangsung. Bermula dari kasus perkelahian antar remaja, kemudian berlanjut kepada kerusuhan yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Dengan kondisi seperti ini, eskalasi konflik meningkat, dan penanganan relatif lebih rumit.

---

<sup>80</sup> Wawancara, tanggal 1 September 2015.

## **BAB IV**

### **MENGEMBANGKAN UPAYA BINA DAMAI**

#### **D.Peran Tokoh dalam Resolusi Konflik**

Seperti digambarkan pada bab sebelumnya, para tokoh lintas agama lebih banyak berperan pada upaya mediasi pasca berlangsungnya konflik. Menurut catatan sejumlah aktivis LSM yang bergerak di bidang pendampingan komunitas di Kota Mataram, peran tokoh agama dan tokoh masyarakat lebih banyak pada tahap mediasi. Tokoh agama dan tokoh agama biasanya dilibatkan untuk proses mediasi konflik.

Seorang aktivis LSM memberikan tanggapannya mengenai keberadaan tokoh agama dan tokoh adat dalam kaitannya dengan penanganan konflik. Mawardi, direktur salah satu LSM di Kota Mataram, menyatakan:

“Biasanya peran tokoh agama hanya dalam memediasi saja. Mereka, tokoh agama dan tokoh masyarakat, tidak bisa memberikan sanksi yang tegas atas oknumnya. Sebaliknya saya kira di beberapa persoalan memang ada tokoh adat yang bisa berperan dan justru berani memberikan sanksi dengan tegas atas pelakunya karena dalam masyarakat kan ada lembaga kerame gubuk itu”.

Kehadiran tokoh agama dengan demikian lebih banyak pada tahap de-eskalasi konflik. Artinya mereka hadir dan diundang oleh pemerintah setelah konflik berlangsung. Di beberapa lokasi, bahkan kehadiran tokoh agama justru relatif kurang kuat dibanding tokoh adat. Tokoh yang disebut kedua ini memiliki otoritas berupa pemberian sanksi atas nama kesepakatan komunitas (krama gubuk). Tidaklah mengherankan bila selama ini banyak yang menyatakan bahwa

keterlibatan tokoh agama dalam resolusi konflik masih sebatas pemadam kebakaran. Mereka terlibat memadamkan api, baru setelah terjadi kerusuhan atau konflik sosial.

Secara umum dalam menangani konflik, lebih banyak dilakukan secara reaktif. Penanganan yang bersifat pencegahan dirasa masih kurang. Padahal seperti telah banyak dikaji, peran tokoh-tokoh informal baik tokoh adat atau tokoh agama sangat penting bagi upaya resolusi konflik. Hal ini diakui oleh warga masyarakat. Mawardi menyatakan:

“Yang paling banyak berperan dalam penyelesaian konflik itu menurut saya justru tokoh adat dan tokoh agama karena merekalah yang paling pertama kali menghadapinya kan merekalah yang memiliki tanggung jawab moral, meski memang ada juga tokoh agama dan tokoh adat dengan persepektif individu mereka sebenarnya yang justru menjadi provokasinya (“namun semua itu kan munculnya nanti di belakang-belakang gitu”). Sedangkan peran pemerintah *kan cuma* bina suasana. Karena memang dalam konteks penanganan konflik *kan* pemerintah datangnya belakangan setelah tokoh agama dan tokoh adat”.

Dari penuturan ini, terlihat bahwa peran tokoh agama dan tokoh adat sebetulnya sangat penting. Mereka justru berada di garda terdepan dalam menciptakan suasana damai. Dalam mengelola konflik, tokoh agama memulainya dengan pemberian nasehat ajaran agama mengenai perlunya hidup rukun, menjaga hubungan baik dengan sesama dan gotong royong. Pola ini biasa dikenal dengan *cooling down* (mendinginkan suasana). Pihak-pihak yang bermasalah diajak duduk bersama untuk mencari jalan keluar.

Pada proses mediasi, peran tokoh agama ada dua. Bila konflik berlangsung di internal kelompok tokoh agama berperan sebagai mediator. Tokoh agama bertindak sebagai juru damai yang menengahi perselisihan di kalangan

internal warga. Sedangkan bila persoalan melibatkan komunitas atau agama lain, tokoh agama berperan sebagai representatif atau wakil dari komunitas. Adapun mediator biasanya dilakukan oleh pihak pemerintah.

Proses mediasi dilakukan dengan mengajak semua pihak yang terlibat untuk bermusyawarah mencari jalan keluar. Keberhasilan proses musyawarah juga sangat tergantung pada kondisi psikologis pihak-pihak yang terlibat dan kepiawaian sang tokoh memainkan peran mediasi. Beberapa tokoh agama yang sangat kharismatik seperti Tuan Guru besar atau Pedanda berhasil dengan cepat mendamaikan suasana. Sebagian yang lain terkadang perlu beberapa hari agar semua pihak yang terlibat menerima kesepakatan perdamaian dan bersedia saling memaafkan.

Dalam proses mediasi, tokoh agama terkadang lebih banyak memainkan peran *arbitrase* ketimbang mediasi. Sebagaimana diketahui, salah satu prinsip mediasi adalah *win-win solution*. Untuk mengarah pada kesepakatan *win-win solution* tersebut, inisiatif pemecahan masalah berasal dari para pihak yang bersengketa (*disputants*), bukan dari mediator. Prinsip ini penting dilakukan untuk menjamin bahwa usulan kesepakatan atau usulan perdamaian berasal kerelaan dan kesadaran penuh para pihak yang bersengketa (*disputants*). Sehingga mereka punya tanggungjawab untuk mematuhi hasil kesepakatan yang telah dicapai. Apabila inisiatif datang dari mediator, seringkali para pihak hanya menyetujui kesepakatan saat proses mediasi berlangsung, tanpa ada komitmen untuk mematuhi kesepakatan tersebut di kemudian hari. Tidak jarang, meskipun kesepakatan perdamaian telah disetujui, konflik bisa muncul karena ada beberapa

pihak yang merasa tidak menyetujui kesepakatan. Di sinilah kepiawaian para tokoh dalam mengelola dan menangani konflik termasuk melakukan mediasi pasca konflik sangat menentukan. Diperlukan kearifan para tokoh sekaligus keterampilan melakukan mediasi dan mengembangkan inisiatif perdamaian.

Dengan menggunakan perspektif resolusi konflik, peran tokoh agama sebagian besar berada pada tahap negosiasi dan tahap *problem solving approach*.<sup>81</sup> Mereka hadir terutama setelah konflik berhasil diredakan oleh aparat keamanan. Kehadiran para tokoh mengajak pihak-pihak bersengketa berunding dan bermusyawarah mjeruapakan tahapan negosiasi. Bila semua pihak telah berhasil diajak untuk bermusyawarah atau berdialog, para tokoh akan melanjutkan ke tahap berikutnya yakni mencari kemungkinan penyelesaian atau yang lebih dikenak dengan sebutan *problem solving approach* (pendekatan pemecahan masalah).

Pada tahap pemecahan masalah, tokoh agama mencoba menengahi dengan meminta masing-masing pihak menceritakan penyebab terjadinya kerusuhan. Tahapan ini sangat memerlukan kerja keras dan kesabaran. Masing-masing pihak akan menceritakan penyebab atau penyulut kerusuhan menurut versi masing-masing. Dengan demikian masing-masing pihak akan berusaha mencari jika bahwa pihaknya dan mengembangkan logika bahwa pihaknya bukan yang memulai. Masing-masing pihak akan menuduh pihak lain sebagai pencari gara-

---

<sup>81</sup> Seperti diulas dalam kerangka teoritik setidaknya ada empat tahapan dalam resolusi konflik yaitu: (1). Tahap de-eskalasi konflik yang menekankan pada proses penghentian kekerasan. Militer atau aparat keamanan biasanya akan melakukan pekerjaan ini. (2) Tahap negosiasi, langkah penyelesaian yang lebih berorientasi politik dengan melibatkan kelompok-kelompok yang bertikai. (3) Tahap *problem solving approach* yang lebih bermuansa sosial. (4) Tahap *peace building*, yakni tahap yang bersifat kultural dan struktural.

gara. Proses ini berlangsung sangat tegang. Suara meninggi, dan semuanya berebut klaim kebenaran. Dalam situasi tersebut ketegasan tokoh sangat menentukan. Biasanya tokoh agama akan mengajak semua pihak untuk tidak melakukan pembenaran sendiri-sendiri. Bila situasinya sudah bisa dikendalikan, langkah selanjutnya adalah mencari penyelesaian.

### **E. Inisiatif perdamaian**

Dalam mengembangkan kerukunan umat beragama sebagai upaya penciptaan bina damai para tokoh agama bergerak pada dua level. Di level internal dan eksternal umat beragama.

Di tingkat internal, selain melakukan mediasi bila terjadi konflik, para tokoh agama juga aktif memberi nasehat tentang pentingnya mengembangkan kerukunan. Di komunitas atau jamaah mereka masing-masing, para tokoh agama biasanya menyampaikan pesan-pesan perdamaian ini. Dibanding agama-agama lain, dalam Islam, pesan perdamaian ini lebih banyak dilakukan. Hal ini mengingat media atau forum untuk mengkomunikasikan pesan-pesan atau ajaran agama ini relatif lebih banyak, seperti melalui pengajian yasinan, khutbah jumat, kuliah tujuh menit (kultum) selepas salat subuh dan lain-lain.

Sementara itu, di kalangan umat Kristen, kegiatan penyampaian pesan perdamaian dilakukan saat para tokoh agama mengisi khutbah. Pendeta Yahya menceritakan:

“Secara individu saya sering menyampaikan dalam khutbah dan dalam pertemuan-pertemuan sesama jemaat Kristen. Sehingga persaudaraan tidak hanya kita ekspresikan dalam nyanyian. Dalam kehidupan nyata itu sebagai suatu yang paling sulit untuk dipraktekkan. Sehingga kita tidak



bisa melihat respons umat dalam penilaian semata akan tetapi hanya bisa kita lihat dalam konteks perubahan hidup umat secara individu”.<sup>82</sup>

Demikian halnya dengan yang terjadi di komunitas Katolik. Pendeta Bob menyatakan, “Setiap saat tokoh agama menyampaikan pesan-pesan kerukunan. Dalam kehidupan Katolik, kami selalu disentil gaya hidupnya dengan segala apa yang diterangkan dalam Injil. Kami selalu diajarkan tentang kejujuran sehingga saya kira ini yang menjadi dasar terciptanya kerukunan”. Lebih lanjut Agus Bob menyatakan:

“Kerukunan dalam agama Katolik adalah saling bantu-membantu dan memperhatikan sesama manusia tanpa mengucilkan cara hidup orang lain. Pada intinya mengasahi orang lain seperti halnya kita mengasahi diri sendiri. Tetapi perilaku ini akan menjadi salah ketika memberikan jalan untuk orang berbuat jahat atau berperilaku tidak benar atau bukan pada tempatnya”.<sup>83</sup>

Hal yang tak jauh berbeda juga berlangsung di komunitas agama Hindu.

Sebagaimana diungkapkan oleh pengurus Parisada Hindu Dharma, berikut ini:

“Setiap pelaksanaan upacara atau Puje Wali kami menyampaikan Sapta Darma atau Darma Wacana. Jadi pada saat upacara itulah kita menjelaskan dan menyampaikan semua *seloka-seloka Weda* yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau masalah respons maka kami serahkan dan kembalikan pada individu itu karena nilai-nilai dalam Weda itu *kan* ada pemahaman subyektif individu meski kami secara kelembagaan memberikan pengayoman dan pengarahan pemahaman tentang kerukunan yang aplikatif”.<sup>84</sup>

Sebagian tokoh lain menyatakan bahwa pola bina damai dapat terwujud dengan jalan mengamalkan butir-butir sila Pancasila. Dalam kelima sila dasar negara Republik Indonesia ini terkandung nilai-nilai kerukunan antar umat

---

<sup>82</sup> Wawancara, tanggal 26 Agustus 2015.

<sup>83</sup> Wawancara, tanggal 25 Agustus 2015.

<sup>84</sup> Wawancara, tanggal 30 Agustus 2015

manusia, antar warga negara dan antar umat beragama. Secara panjang lebar,

Yahya Mugiono menjelaskan:

“Pola bina damai seharusnya dikembalikan dalam pengamalan butir-butir Pancasila. Sehingga jika semua butir yang 40 itu diterapkan maka akan menciptakan damai. Namun penerapan dan pengamalannya *kan* tidak seideal dan semaksimal yang dibayangkan. Sehingga sebenarnya toleransi yang seharusnya dibangun adalah toleransi dalam intern agama itu baru kemudian toleransi lintas agama. Hal ini disebabkan karena dalam Protestan sebenarnya ini adalah hal yang sulit karena dalam Kristen ada denominasi (aliran). Setiap denominasi ini tidak begitu gampang dapat mengikuti faham denominasi lainnya. Pola bina damai yang bisa kita jalankan dalam proses kehidupan yang terstruktur adalah dengan menjalankan ketetapan MPR tahun 2003. Karena apapun yang terjadi disebabkan letupan-letupan ekspresi pemahaman dan kepentingan individu”<sup>85</sup>.

Menurut para tokoh agama, pengembangan bina damai harus dimulai dari hubungan yang harmonis dan saling pengertian di kalangan umat seagama atau internal agama. Di tingkat internal agama sebagaimana dikmafhumi terdapat banyak elemen atau kelompok keagamaan. Ada kelompok madzhab, denominasi, kelompok organisasi keagamaan, dan sebagainya yang juga memerlukan pengembangan perdamaian. Sifat keanggotaan keagamaan yang tak lagi tunggal, potensial memunculkan perbedaan. Perbedaan yang tidak terkelola secara baik akan potensial menimbulkan konflik dan ketegangan. Jadi benar adanya bila pola kerukunan dan bina damai dimulai dari tingkat internal dan dilanjutkan pada tingkat eksternal lintas umat beragama.

Tentang efektifitas seruan perdamaian sebagaimana disampaikan para tokoh lintas agama ini, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Seperti persoalan politik, ekonomi, budaya dan agama itu sendiri. Secara umum setiap tokoh sering

---

<sup>85</sup> Wawancara, tanggal 26 Agustus 2015.

menyampaikan pesan kerukunan. Tetapi efektifitasnya akan sangat ditentukan oleh sejauhmana setiap pemeluk mempraktikan ajaran tersebut dalam relasi sosial. Satu hal penting untuk dicatat, bahwa kesediaan dan keaktifan para tokoh dalam menyampaikan seruan perdamaian di kalangan jamaah atau umat menjadi modal penting bagi pengembangan bina damai di Mataram.

Selain menyampaikan seruan perdamaian, berkaitan dengan pencegahan konflik, kegiatan tokoh agama di Kota Mataram patut mendapat apresiasi. Salah satunya adalah kegiatan deklarasi damai yang berlangsung di Lt I Mataram Mall. Kegiatan yang dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2015 dimaksudkan untuk menyikapi kasus kerusuhan dan pembakaran rumah penduduk dan rumah ibadah di Tolikara Papua. Pada kesempatan tersebut tokoh lintas agama dan pemuda lintas agama sepakat menandatangani deklarasi damai. Setelah pembacaan naskah deklarasi tersebut, selanjutnya deklarasi diserahkan kepada Gubernur Provinsi NTB DR. TGH. M. Zainul Majdi, MA yang hadir dan memberi apresiasi serta dukungan terhadap kegiatan positif ini.

Kepedulian tokoh agama untuk mengajak umat tidak bertindak anarkhistis dalam menyikapi kejadian di tempat lain merupakan langkah maju. Langkah maju bagi upaya mengembangkan kedewasaan umat. Kedewasaan dan kematangan umat dalam merespons persoalan relasi antarumat menjadi hal penting agar umat tidak mudah terprovokasi melakukan hal-hal yang kontraproduktif bagi penciptaan bina damai. Semakin dewasa seseorang dalam beragama maka semakin mendorong berkembangnya kerukunan dan harmoni sosial.

Problem penciptaan kerukunan sering terganjal oleh munculnya pemahaman yang sempit dan kurang dewasa. Munculnya fenomena keberagaman yang kurang dewasa seperti itu, acapkali karena para tokoh agama kurang matang dalam merespon persoalan relasi antar umat beragama. Hal ini sebagaimana diingatkan oleh Appleby bahwa seringkali para aktor yang karena kurangnya kedewasaan dalam beragama atau kerap disebut “*religious illiteracy*”<sup>86</sup>, gagal menjadi pengembang perdamaian.

Problem “kekurang-dewasaan” dalam beragama menampak pada penolakan sejumlah tokoh terhadap rencana pembangunan tempat ibadah. Pembangunan tempat ibadah merupakan problem paling krusial dalam relasi antar umat beragama. Sebagian tokoh merasa ketakutan apabila di sebuah lokasi akan didirikan rumah ibadah oleh penganut agama lain.

Berkaitan dengan hal ini, H. Badrun, ketua FKUB Kota Mataram menyatakan bahwa memang sebagian tokoh termasuk tokoh dari kalangan umat Islam kurang berkenan bila ada pembangunan sarana atau rumah ibadah baru sementara umat agama tersebut terbilang sedikit. “Seharusnya kita tidak terlalu berlebihan dalam merespons hal-hal demikian. Karena semua orang punya hak untuk menyembah Tuhan”, demikian ujar H. Badrun. Lebih lanjut ia menyatakan:

“Saya baru saja kedatangan tamu, tokoh masyarakat agama Islam dari wilayah Cakra. Beliau itu kurang bisa menerima rencana pembangunan gereja. Beliau menggalang dukungan dari komunitas Hindu, supaya gereja tak jadi dibangun di wilayah itu. Alasannya, tidak ada jamaah Kristen di wilayah tersebut. Tapi saya ingatkan mengapa *sih* kita ini susah-susah. *Side* kenapa menghalangi orang tersebut. *Kan* dia hanya

---

<sup>86</sup>Appleby menyebut istilah “*religious illiteracy*” sebagai sebuah sikap yang dapat dimaknai sebagai sikap kejumudan atau kedangkalan dalam menafsirkan agama. Selengkapnya lihat R.S. Appleby, *The Ambivalence of the Sacred: Religion and Violence, and Reconciliation* (New York: Rowman and Littlefield, 2000), 69.

minta izin tidak minta sumbangan. *Ayok* kita terima saja. Kita ini sudah besar, mengapa tidak memberi rasa aman kepada yang kecil”.<sup>87</sup>

Guna menghindari benturan antar kelompok agama, pemerintah sebetulnya telah menerbitkan peraturan yang mengatur pendirian rumah ibadah, misalnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006.<sup>88</sup> Dalam peraturan itu, syarat pendirian rumah ibadah telah diatur secara rinci.

Persoalan rumah ibadah, meskipun telah diatur secara rinci, tetapi faktanya banyak ketegangan muncul mengiringi pendirian rumah ibadah tersebut. Di berbagai daerah, masih saja ditemui persoalan pelarangan pembangunan rumah ibadah tersebut. Persoalan muncul terutama bagi kelompok minoritas agama yang hendak mendirikan tempat ibadah. Kelompok mayoritas biasanya akan menerapkan peraturan yang relatif rumit. Bila dikaji secara lebih mendalam, masih adanya ketegangan yang mengiringi pembangunan rumah ibadah ini menunjukkan bahwa komunalisme dan kontestasi antar umat beragama masih terbilang tinggi di Indonesia. Masyarakat masih belum sepenuhnya siap menghadapi dan menerima kehadiran kelompok lain secara leluasa.

Semua kondisi di atas memerlukan perhatian tokoh-tokoh lintas agama agar mampu menyadarkan dan membina umatnya terutama dalam menyikapi dan menghargai perbedaan. Orientasi memperbanyak jumlah atau kuantitas umat

---

<sup>87</sup> Wawancara, 2 Agustus 2015.

<sup>88</sup> Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 berisi tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

semestinya bukan prioritas pengembangan keagamaan, melainkan orientasi pada peningkatan kualitas iman umat beragama yang lebih utama.

## **F. Kendala yang dihadapi**

Dalam upaya mengembangkan kegiatan resolusi konflik dan upaya bina damai (*peace building*), sejumlah kendala dihadapi oleh para tokoh agama ini. Dari berbagai penuturan para tokoh lintas agama, berikut beberapa kendala yang krusial:

1. Program bina damai belum dilakukan secara sistematis.

Seperti diketahui program bina damai atau *peace building* merupakan langkah lanjutan dari dua tahapan konflik; tahap *peace keeping* dan *peace making*. *Peace keeping* diorientasikan untuk menghentikan pertikaian atau kerusuhan. Termasuk dalam tahapan pertama misalnya kegiatan penerjunan aparat keamanan atau kepolisian. Tujuannya supaya konflik tidak meluas dan tidak menimbulkan korban jiwa lebih banyak.

Sebagai tahapan lanjutan, kegiatan *peace building* diarahkan untuk mendorong berbagai pihak menjaga kesepakatan damai agar terus berjalan dan menuju ke arah harmoni. Tahapan *peace building* merupakan tahapan penting agar konflik kekerasan tidak terulang di masa yang akan datang. Kegiatan ini bersifat kultural dengan melibatkan elemen masyarakat secara luas. Untuk konteks Mataram, elemen masyarakat yang sangat strategis adalah tokoh agama.

Belum adanya program bina damai sistematis yang ditawarkan pemerintah menyebabkan peran tokoh agama kurang maksimal. Selama ini program pengembangan bina damai lebih banyak dilakukan secara insidental oleh lembaga swadaya masyarakat. Program-program ini lebih bersifat reaktif ketimbang preventif.

Pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)<sup>89</sup> Kota Mataram sebetulnya telah memiliki program siaga dini untuk mendeteksi dan mengantisipasi kerusuhan sosial atau bencana sosial.<sup>90</sup> Hanya saja, tampaknya program ini kurang berjalan secara maksimal. Kegiatan antisipatif mutlak dilakukan agar berbagai persoalan tidak terlambat untuk ditangani. Untuk mengantisipasi kerusuhan atau konflik sosial, menurut tokoh agama, bila perlu badan intelijen segera turun tangan dan cepat memberitahukan kepada pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal ini, I Gede Mandre, pengurus Parisada Hindu Dharma NTB, menyatakan:

“Saya kira pemerintah itu selalu terlambat atau mungkin badan intelijennya itu tidak cepat dan sigap melihat sinyal-sinyal atas kejadian yang ada. Sehingga sebenarnya sistem (siaga) ini harus membuat suatu model penanganan untuk mengidentifikasi sinyal-sinyal konflik yang ada”.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Tentang profil dan program Kesbangpol liat <http://bakesbangpoldagri.ntbprov.go.id/index.php/tugas-fungsi/>

<sup>90</sup> Salah satu program siaga dini yang ada di Kesbangpol yaitu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Forum ini dibentuk mulai dari tingkat Kota, Kecamatan hingga kelurahan. Hanya saja tidak semua desa/kelurahan memilikinya.

<sup>91</sup> Wawancara, tanggal 30 Agustus 2015

Diharapkan agar pemerintah melibatkan tokoh agama sejak awal. Keterlibatan ini dimaksudkan agar para tokoh agama sejak dini dapat terlibat memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang perlunya menjaga kerukunan di internal umat maupun mengembangkan toleransi secara lebih baik dengan umat atau komunitas lain.

Penanganan pra-konflik idealnya merupakan kegiatan yang lebih banyak memperoleh perhatian pemerintah. Pemerintah belum maksimal dalam menyiapkan langkah konkrit dalam mengantisipasi konflik. I Gede Mandre menyatakan:

“saya katakan pemerintah belum optimal melakukan penanganan dari setiap konflik. Sesungguhnya yang berat itu adalah dalam proses pra-konflik bukan pascakonflik. Kalau sekarang saya lihat penanganan yang ada itu masih dalam tataran setelah konflik saja. Sebenarnya pemerintah harus sadar bahwa adanya keberagaman yang ada di Mataram seharusnya itu sudah dapat menunjukkan sebagai salah satu penyebab konflik. Pemerintah harus punya strategi dari keadaan tersebut”.<sup>92</sup>

2. Koordinasi dengan dan antar tokoh belum sepenuhnya berjalan maksimal.

Kendala berikutnya yang kurang mendukung program bina damai adalah belum maksimalnya komunikasi dan koordinasi antar tokoh lintas agama. Komunikasi lintas tolok yang selama ini berlangsung sebagian besar melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Dalam wadah yang diinisiasi oleh pemerintah ini,

---

<sup>92</sup> Wawancara, tanggal 30 Agustus 2015



para tokoh dapat saling bertegur sapa, saling memahami posisi dan kedudukan masing-masing, sambil berupaya menciptakan kerukunan intra dan antar umat beragama.

Menurut Yahya Mugiono, komunikasi dan silaturahmi antartokoh dan antarwarga merupakan kunci membangun toleransi dan kerukunan. Ia, mengungkapkan, “Dalam pola penanganan konflik yang ada, bila kita mengamati sebenarnya karena ini semua bersifat sosial kemasyarakatan, maka seharusnya kuncinya adalah silaturrahi antaragama dan antarras”.<sup>93</sup>

Dalam konteks pengembangan modal sosial, komunikasi merupakan *starting point* bagi terbangunya *civic engagement*, menguatnya *trust* dan *resiprositas*. *Civic engagement* atau ikatan antarwarga hendaknya terbangun melalui komunikasi yang saling jujur dan tanpa pretensi politis. Warga masyarakat akan dengan sukarela melakukan interaksi secara alamiah melalui komunikasi yang alamiah pula. Bila ikatan antarwarga ini telah terbangun, kepercayaan akan meningkat maka dengan sendirinya tradisi resiprositas atau tradisi timbal balik dapat berjalan secara simultan.

Komunikasi antartokoh yang bersifat informal juga merupakan cara efektif bagi mencairnya kebuntuan dialog-dialog lintas agama. Melalui komunikasi, berbagai perbedaan keyakinan, tradisi, termasuk tata cara peribadatan dapat saling dimengerti.

---

<sup>93</sup> Wawancara, tanggal 26 Agustus 2015.

Dengan demikian kecurigaan, stigma negatif atas kelompok lain dapat dieliminir bila masing-masing tokoh agama dan umat mengerti dan memahami apa yang dilakukan kelompok lain.

Melalui komunikasi yang efektif antartokoh dan antarwarga, baik di tingkat internal maupun eksternal agama, maka berbagai upaya provokasi tidak akan berpengaruh bagi relasi antarwarga. Provokasi dapat berlangsung efektif manakala masing-masing kelompok jarang mengembangkan komunikasi. Dalam momen-momen tertentu tak jarang banyak pihak -yang memiliki agenda politik terselubung- suka memancing di air keruh. Melemparkan isu-isu negatif yang merusak kondusifitas dan ketenangan masyarakat Mataram. Pada momen-momen politik menjelang, saat atau pasca pemilu-kada sangat potensial munculnya isu negatif tersebut.

Selain bermanfaat bagi pengembangan kerukunan antarumat, komunikasi yang efektif juga penting bagi pengembangan bina damai di tingkat internal umat beragama,. Ketegangan di kalangan internal umat beragama sering kali juga dipicu pola komunikasi yang tersumbat. Ketersumbatan ini kadang kala diperparah dengan munculnya aliran-aliran baru dalam suatu agama tertentu. Di kalangan umat Islam misalnya, pernah terjadi konflik kekerasan yang melibatkan kelompok *mainstream* dengan kelompok atau aliran tertentu dalam Islam. Kasus kekerasan massa yang melibatkan umat islam kalangan *mainstream* dengan Jamaah Salafi di Kediri, Sesela

(Lombok Barat) beberapa tahun yang lalu disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara tokoh agama. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Faizah misalnya terungkap bahwa munculnya kerusuhan yang menimpa pengikut *salafi* diakibatkan oleh kegagalan para pemimpin salafi dalam menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh umat Islam kalangan *mainstream*.

Demikian halnya dengan yang terjadi di kalangan Kristen, para tokoh agama tersebut juga kerap dibuat gelisah oleh kehadiran para “penginjil jalanan”. Agus Bob misalnya menyatakan, “komunikasi perlu untuk dapat menghindari munculnya penginjil-penginjil jalanan. Yang dapat mengajarkan nilai agama tidak semestinya”.<sup>94</sup> Potensi perbedaan yang memicu benturan dengan demikian dapat terjadi pada agama apa saja.

### 3. Koordinasi dengan instansi terkait belum maksimal.

Koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah merupakan hal penting bagi untuk kelancaran dan kelangsungan program bina damai secara lebih terprogram. Koordinasi secara cepat dibutuhkan bukan hanya saat konflik sedang berlangsung, tetapi yang lebih penting lagi adalah koordinasi dalam mendeteksi dan mengantisipasi ketegangan yang potensial menimbulkan konflik kekerasan. Kegiatan ini bukan berarti merupakan bentuk kooptasi atau hegemoni pemerintah terhadap para tokoh agama, tetapi lebih merupakan

---

<sup>94</sup> Wawancara, tanggal 25 Agustus 2015.

penyamaan persepsi, orientasi dan aksi bagi penciptaan kerukunan di antara warga.

Koordinasi antar lembaga dalam penanganan konflik idealnya dilakukan dan diinisiasi oleh pihak Pemerintah. Dengan otoritas dan kewenangannya pemerintah daerah dapat mengumpulkan para tokoh agama dan instansi terkait untuk bersama-sama mengembangkan pola bina damai. “Ya, kita berharap pemerintah daerah melalui kemenag atau kesbang dapat menjadi *leading sector* bagi pengembangan kerukunan”, demikian harapan ketua FKUB Kota Mataram, H. Badrun.<sup>95</sup>

Hal yang sama juga diutarakan beberapa pimpinan keagamaan. Menurut mereka pemerintah dapat memfasilitasi sejumlah tokoh dalam program pengembangan kerukunan warga. “Kalau koordinasi cepat, penanganan kasus konflik di masyarakat akan menjadi cepat. Kalau kita para agamawan yang jadi koordinator tidak tepat. Kita ini sifatnya membantu”, kata Yahya Mugiono.

Koordinasi diperlukan supaya berbagai persoalan dapat terselesaikan secara mudah. Melalui koordinasi yang baik, para tokoh agama dapat menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi dan dialami oleh masyarakat. “Sebenarnya, banyak hal yang bisa kita sampaikan kalau kita sering bertemu”, demikian kata I Gusti.

---

<sup>95</sup> Wawancara, 4 Agustus 2015.

Kegiatan koordinasi memang dilakukan oleh pemerintah, hanya saja sifatnya insidental. Pada moment-moment tertentu, beberapa instansi seperti Kementerian Agama, Kesbanglinmas, atau instansi pemerintah lainnya mengadakan rapat dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Seperti pertemuan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menyikapi kejadian tertentu. Pemprakarsa kegiatan pertemuan biasanya disesuaikan dengan kasus atau kejadian yang hendak disikapi. Pada kasus penanggulangan terorisme dan radikalisme yang menjadi penyelenggaranya biasanya pihak Kepolisian, Kementerian Agama dan LSM. Sedangkan untuk tema politik dan hukum, pertemuan diprakarsai oleh Kesbanglinmas.

#### 4. Program kegiatan bersifat monoton.

Problem berikutnya berkaitan dengan program tokoh lintas agama atau lintas iman adalah program kegiatan yang bersifat monoton. Kegiatan yang melibatkan tokoh-tokoh lintas agama lebih banyak didominasi oleh seminar dan dialog. Kegiatan seminar dan dialog lebih banyak dilakukan di hotel-hotel dan kurang melibatkan massa di tingkat bawah. Kegiatan dialog hanya berlangsung di kalangan elit saja.

Berkaitan dengan hal di atas, seorang tokoh agama dari komunitas Hindu, I Gede Mandre, menyatakan:

“Saya kira lingkungan heterogen itu ada di lingkungan desa dan masyarakat. Selama ini kemesraan di level elit itu tidak sampai di masyarakat. Oleh karena itu penting untuk membangun sampai tataran level terbawah. Bahkan penting

untuk mengadakan pertemuan ataretnis di tingkat desa bukan di hotel-hotel, atau kantor saja. Artinya pertemuan antartokoh agama itu dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan yang berbeda-beda”.

Dengan mengadakan pertemuan di tingkat desa diharapkan keharmonisan antara elit dapat dirasakan juga di lapisan masyarakat bawah. Selain tempatnya yang bervariasi (tidak hanya di hotel atau kantor pemerintah semata), dialog hendaknya juga berlangsung secara emansipatoris. Menurut Azyumardi Azra, “dialog emansipatoris” dapat diartikan sebagai pembicaraan atau percakapan di antara dua pihak atau lebih yang “membebaskan”, karena terjadinya pertukaran dan pemahaman timbal balik yang lebih baik di antara mereka. Dialog emansipatoris ini menurut Azra dapat “membebaskan” pihak-pihak yang terlibat dalam dialog dari prasangka, *bias*, persepsi tidak akurat, kecurigaan dan bahkan sikap bermusuhan dan saling membenci, yang potensial menciptakan konflik yang dapat berujung pada kekerasan.<sup>96</sup> Jadi dialog yang melibatkan tokoh lintas agama hendaknya dilakukan secara jujur, bebas, terbuka dan penuh kearifan serta tenggang rasa.

Di samping dialog, program kegiatan yang dikembangkan para tokoh lintas agama di Kota Mataram juga belum mengarah pada kerja praktis. Kerja praktis yang dimaksud adalah program kerja yang langsung bersentuhan dengan persoalan nyata yang dihadapi umat

---

<sup>96</sup> Selengkapnya lihat Azyumardi Azra, “Dialog Emansipatoris, Negara dan Kerukunan Umat Beragama”, dalam Suprpto, *Semerbak Dupa di Pulau Scribu Masjid* (Jakarta: Prenada Kencana, 2013).

beragama. Seperti kita ketahui, tantangan agama-agama saat ini sangat banyak seperti persoalan kemiskinan, kerusakan lingkungan hingga radikalisme agama. Persoalan-persoalan ini merupakan persoalan nyata yang dihadapi umat beragama. Para tokoh agama dapat bergandeng tangan ikut serta mencari jalan keluar berbagai persoalan tersebut. Dengan demikian agama-agama yang berbeda-beda itu sejatinya menghadapi musuh yang sama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **C. Kesimpulan**

Penguatan program bina damai (*peace building*) memerlukan dukungan dan partisipasi semua elemen masyarakat, terutama dari kalangan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kehadiran pemimpin informal seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi penting untuk membantu kinerja pemimpin formal (pejabat pemerintah daerah) dalam mewujudkan kedamaian warga di Kota Mataram.

Tokoh lintas agama memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan program bina damai. Otoritas keilmuan para tokoh dan kedekatan mereka dengan umat merupakan modal penting -yang tak dimiliki elemen masyarakat lain- dalam mengembangkan suasana damai di kalangan umat beragama.

Banyak upaya yang dilakukan para elit atau tokoh agama dalam kaitannya dengan resolusi konflik. Upaya ini berlangsung pasca maupun sebelum terjadinya konflik. Pasca konflik, para tokoh agama bertindak sebagai mediator yang menengahi berbagai pihak yang bersengketa (*disputants*). Adapun sebelum terjadinya konflik, para tokoh lebih banyak memberikan seruan moral untuk melaksanakan ajaran luhur agama masing-masing. Inti ajaran agama adalah mendorong setiap pemeluk untuk hidup rukun dengan



sesama, mementingkan musyawarah dan menghormati agama lain. Hanya saja, elit atau tokoh agama lebih banyak berperan pascaterjadinya konflik. Mereka kurang difasilitasi oleh pemerintah untuk mengembangkan program-program pencegahan konflik seperti sistem siaga dini untuk mengantisipasi bencana sosial.

Kendala yang dihadapi berkaitan dengan program bina damai antara lain:

- 1) Program bina damai (*peace building*) belum dilakukan secara sistematis dan terprogram,
- 2) Koordinasi dengan dan antar tokoh belum sepenuhnya berjalan maksimal
- 3) Koordinasi dengan instansi terkait belum optimal.
- 4) Program kegiatan yang bersifat monoton dan belum variatif.

## **D.Rekomendasi**

Memungkasi laporan penelitian ini, berikut disampaikan beberapa rekomendasi.

Pertama, program bina damai (*peace building*) merupakan program penting bagi upaya merawat dan menjaga pluralitas masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah (pusat maupun daerah) sudah seharusnya memberi perhatian lebih pada pengembangan bina damai tersebut.

Kedua, program bina damai dan sistem siaga dini perlu dikembangkan secara sistematis, terprogram dan berkelanjutan dengan melibatkan semua elemen masyarakat termasuk para elit atau tokoh lintas agama.

Ketiga, pengkajian lebih mendalam mengenai resolusi konflik dan upaya bina damai perlu dikembangkan melalui penelitian partisipatif. Penelitian partisipatif tersebut dengan melibatkan masyarakat tokoh lintas agama dan perwakilan masyarakat kota Mataram.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur* (Yogyakarta, LkiS, 2005).
- Ashutosh Varshney at.al., "Pattern of Collective Violence in Indonesia (1990-2003)", UNSFIR (United Nation Support Facility for Indonesian Recovery) Jakarta: Report UNSFIR, 2004.
- CA. Coppel, ed. *Violent Conflicts in Indonesia: Analysis, Representation, Resolution* (London: Routledge, 2005).
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 183.
- Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi; Suatu Pengantar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).
- Erni Budiwanti, "Pluralism Collapses: A Study of The Jamaah Ahmadiyah Indonesia and its Persecution," ARI Working Paper No. 117, National University of Singapore, May 2009.
- Erni Budiwanti, *Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima* (Yogyakarta: LkiS, 2000).
- Faizah, *Dakwah Salafiyah di Lombok (Suatu Kajian Komunikasi antar Budaya)*, Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Fathurrahman Mukhtar, *Konflik dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam di Pesantren Organisasi Nahdlatul Wathan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat*, Disertasi pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.
- Gerry van Klinken, *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars* (London: Routledge, 2007).

- J. Rothman, *From Confrontation to Cooperation: Resolving Ethnic and Regional Conflict* (Newbury Park, CA: Sage, 1992).
- Jacques Bertrand, *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia* (New York: Cambridge University Press, 2004)
- Jajat Burhanuddin dan Arif Subhan, eds., *Sistem Siaga Dini terhadap Kerusuhan Sosial* (Jakarta: Balitbang Agama Depag RI dan PPIM, 2000).
- Jeremy J Kingsley, "Peacemakers or Peace-Breakers? Provincial Elections and Religious Leadership in Lombok, Indonesia", *Indonesia 93* (Apr 2012): 53-82.
- , *Tuan Guru, Community and Conflict in Lombok, Indonesia*, Ph.D thesis, (Melbourn: The University of Melbourn, 2010).
- John Ryan Bartholomew, *Alif Lam Mim Kearifan Masyarakat Sasak* ter. Imron Rasyidi (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001).
- Julia Brannen, ed. *Mixing Methods: Qualitative and Quantitative Research*, (Vermont: Asghate Publishing Company, 1992).
- Karrie McLaughlin dan Ari Perdana, *Conflict and Dispute Resolution in Indonesia Information from the 2006 Governance and Decentralization Survey* dalam *Indonesian Social Development Paper No. 16* (2010) edisi online dapat dilihat di [www.conflictanddevelopment.org](http://www.conflictanddevelopment.org).
- L. Ahmad Zaenuri, "Konflik Jemaat Ahmadiyah dengan Masyarakat Non Ahmadiyah (Studi Kasus di Lombok Nusa Tenggara Barat)" Disertasi SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Lewis Coser, *The Function of Social Conflict*, (New York: Free Press, 1965).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).
- Morton Deutsch, *The Resolution of Conflict* (New Haven: Yale University Press, 1973).
- Muhsin Jamil, (ed). *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik* (Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007).

- Nur Achmad (Ed)., *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keragaman* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001).
- Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse and Hugh Mial, *Contemporary Conflict Resolution. The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts* (Cambridge: Polity Press, 2006).
- R. Murray Thomas, *Blending Qualitatif and Quantitatif Research Methods in Theses and Dissertation* (California: Corwin Press, Inc A Sage Publications Company, 2003).
- Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society* (Stanford: Stanford University Press, 1959).
- Saipul Hamdi, *Nahdlatul Wathan: Agama Konflik Komunal dan Peta Rekonsiliasi* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2014)
- Simon Fisher, at all, *Mengelola Konflik Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, ter. S.N. Karikasari dkk. (Jakarta: The British Council Responding to Conflict, tth).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
- Suprpto, *Semberak Dupa di Pulau Seribu Masjid* (Jakarta: Prenada Kencana, 2013).
- Sven Cederroth, *The Spell of The Ancestors and The Power of Mekkah, A Sasak Community on Lombok*, (Goteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 1981).
- Syafuan Rozi dkk., *Kekerasan Komunal: Anantomi dan Resolusi Konflik di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006).